

**ANALISIS PENGARUH KEUANGAN SOSIAL ISLAM TERHADAP KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT INDONESIA 2019-2023**

Tesis S-2
Program Ilmu Ekonomi



Diajukan Oleh:
Raihanah Luthfi
21918013

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2026**

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2026 Program Studi Ilmu Ekonomi Program Magister,
Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis
yang disusun oleh :

RAIHANAH LUTHFI

No. Mhs. : 21918013

Konsentrasi : Ekonomi dan Keuangan Syariah

Dengan Judul:
**ANALISIS PENGARUH KEUANGAN SOSIAL ISLAM TERHADAP KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT INDONESIA 2019-2023**

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Drs. Achmad Tohirin, M.A., Ph.D.
M.Ec.

Penguji II



Prof. Dr. Edy Suandi Hamid,

Mengetahu

Ketua Program Studi,



Prof. Drs. Agus Widarjono, M.A., Ph.D.

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, 22 Februari 2026

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Achmad Tohirin', is positioned above the name of the supervisor.

Drs. Achmad Tohirin, M.A., Ph.D.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”.

Yogyakarta, 23 Februari 2026



Raihanah Luthfi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahillāhi rabbil ‘ālamīn, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, yang telah menjadi teladan bagi umat manusia sepanjang masa.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jenjang Strata Dua (S2) di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dan dukungan berbagai pihak, baik berupa waktu, tenaga, pikiran, maupun doa. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian tesis ini.

1. Drs. Achmad Tohirin, MA., Ph. D selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama proses penyelesaian tugas akhir ini.
2. Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec selaku Dosen Penguji Tesis yang telah memberikan masukan sehingga proses penyelesaian tugas akhir ini selesai.
3. Para dosen di lingkungan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan pengalaman yang berharga selama menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ekonomi dan Keuangan.

4. Seluruh Staf Program Studi Pascasarjana Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah membantu mahasiswa, terkhusus penulis dalam menjalankan proses studi.
5. Kedua orangtua penulis yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada saya.
6. Teman-teman MEK 24 yang saling memberikan semangat, Indah, Mas Evan, dan Fuad.
7. Semua pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung turut membantu dalam penulisan tesis ini.

Yogyakarta, 14 Februari 2026

Raihanah Luthfi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Manfaat Penelitian	14
1.5. Sistematika Penulisan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
2.1. Landasan Teori	16
2.1.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	16
2.1.2. Keuangan Sosial Islam.....	19
2.1.3. Keuangan Sosial Islam dan Pertumbuhan Ekonomi.....	28
2.1.4. Kemiskinan	31
2.1.5. Keuangan Sosial Islam dan Kemiskinan.....	33
2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	34
2.1.7. Keuangan Sosial Islam dan Pembangunan Manusia	35
2.2. Kajian Penelitian Terdahulu	38
2.3. Kerangka Pemikiran	41
2.3.1. Hipotesis	42
BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1. Jenis Penelitian	45
3.2. Populasi dan Sampel.....	45
3.3. Metode Pengumpulan Data.....	47
3.4. Variabel	48
3.5. Metode Analisis Data	54

3.6. Tahapan Analisis Data.....	57
BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN.....	60
4.1. Analisis Statistik Deskriptif.....	60
4.2. Analisis Data Kuantitatif	60
4.2.1. Evaluasi Model Pengukuran (outer model)	61
4.2.2. Evaluasi Model Struktural (<i>Inner Model</i>).....	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	95
5.1. Kesimpulan.....	95
5.2. Saran dan Keterbatasan.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Persentase Penduduk Miskin Indonesia Tahun 2013-2024 (%).....	2
Gambar 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2013-2025 (%).....	3
Gambar 1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia Tahun 2013-2025 (%)	4
Gambar 1.4 Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (2013-2025)	9
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	41
Gambar 4.1 Persentase DKSI per bidang program BAZNAS 2019-2023.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Dana Zakat BAZNAS Tahun 2013-2024 (Miliar Rupiah)	7
Tabel 2.1 Daftar Sampel Provinsi	46
Tabel 4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	60
Tabel 4.2 Hasil <i>outer loading</i>	62
Tabel 4.3 Hasil <i>Outer Loading</i> Setelah Eliminasi	62
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas (<i>AVE</i>).....	63
Tabel 4.5 Hasil <i>Discriminant Validity - Cross Loadings</i>	63
Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas.....	64
Tabel 4.7 Hasil Analisis <i>Outer Weight</i> dan <i>Outer Loading</i>	65
Tabel 4.8 Hasil Uji <i>R-Squares</i>	66
Tabel 4.9 Nilai <i>Q2 (Predictive Relevance)</i>	67
Tabel 4.10 <i>Path Coefficient</i>	67
Tabel 4.11 Pengaruh Spesifik Tidak Langsung	71
Tabel 4.12 Jumlah Mustahik berdasarkan Per Bidang Program BAZNAS.....	74
Tabel 4.13 Potensi dan realisasi penerimaan KSI 2019-2022 (Miliar Rupiah)	76

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh distribusi Keuangan Sosial Islam (ZIS-DSKL) terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan mempertimbangkan peran pertumbuhan ekonomi sebagai variabel kontrol dan variabel indeks pembangunan manusia sebagai variabel mediasi. Struktur variabel kesejahteraan masyarakat Indonesia dibentuk melalui beberapa dimensi yaitu kemiskinan, pengangguran, pendidikan, dan kesehatan. Metode yang digunakan adalah *Partial Least Square Modeling (PLS-SEM)*. Data yang digunakan merupakan data panel dari 30 provinsi di Indonesia selama periode 2019-2023 dan dianalisa menggunakan perangkat lunak *SmartPLS 4.1.0.8*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi dana Keuangan Sosial Islam (KSI) berpengaruh lebih konsisten terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui peningkatan kualitas pembangunan manusia, terutama pada dimensi pendidikan dan kesehatan. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi menunjukkan pengaruh yang relatif lemah dan tidak signifikan terhadap beberapa dimensi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: *Keuangan Sosial Islam, Kemiskinan, IPM, Pendidikan*

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of Islamic Social Finance Distribution (ZIS-DSKL) on the welfare of the Indonesian people, considering the role of economic growth as a control variable and the Human Development Index as a mediating variable. The structure of Indonesian social welfare is formed through several dimensions: poverty, education, and health. The method used is Partial Least Square Modeling (PLS-SEM). The data used is panel data from 30 provinces in Indonesia during the 2019-2023 period, and was analyzed using SmartPLS 4.1.0.8 software. The results show that the distribution of Islamic Social Finance (KSI) funds has a more consistent impact on the welfare of the Indonesian people by improving the quality of human development, particularly in the dimensions of education and health. Conversely, economic growth shows a relatively weak and insignificant effect on several dimensions of Indonesian social welfare.

Keywords: *Islamic Social Finance, Poverty , HDI, Education*

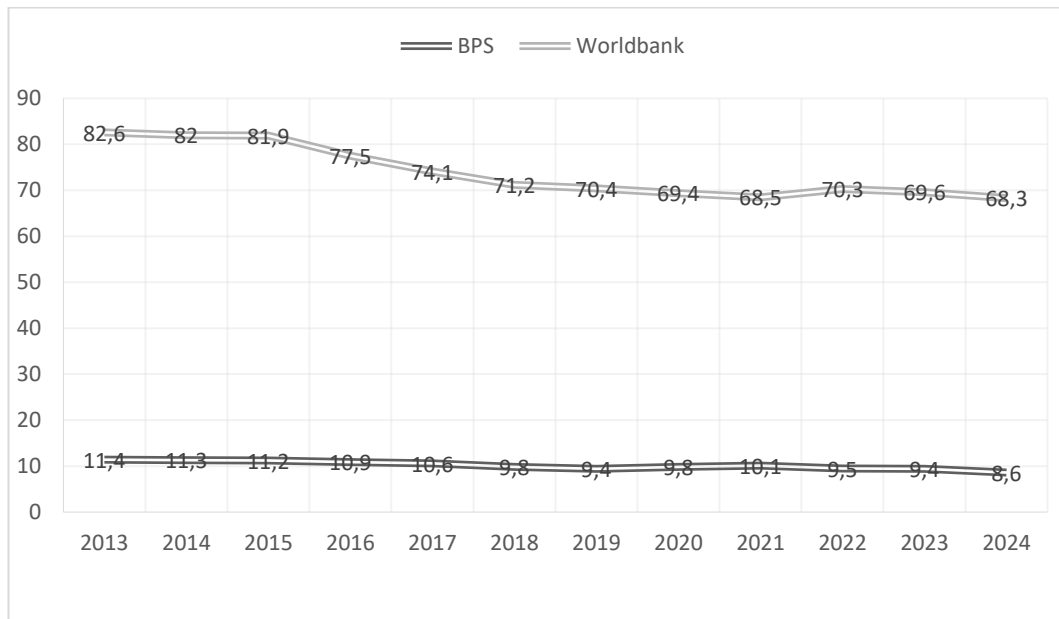
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan masih menjadi masalah sosio-ekonomi yang sangat diperhatikan baik dalam lingkup nasional maupun dunia terutama negara-negara berkembang seperti Indonesia. Penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu fokus tujuan dan sasaran global dalam agenda 2030 untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yakni upaya mensejahterakan masyarakat secara inklusif baik di negara maju maupun negara berkembang (Sekretariat Nasional SDGs, t.t.). Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan mengenai percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim diseluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024 melalui diterbitkannya Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim. Kebijakan tersebut meliputi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan (BPK, 2022). Kemiskinan ditentukan atas beberapa variabel dan dimensi seperti dimensi ekonomi, kesehatan, politik, dan pendidikan sehingga penanganannya menjadi kompleks dan sering kali kebijakan yang diterapkan belum sepenuhnya selaras.

Penanggulangan kemiskinan secara global mengalami kemajuan dalam dua dekade terakhir, akan tetapi mengalami kemunduran pada tahun 2020 dimana pandemi Covid-19 meningkatkan angka kemiskinan ekstrim global sekitar 9,3% atau meningkatkan total kemiskinan global menjadi lebih dari 700 juta orang (*world bank, 2022*).



Sumber Data: *World Bank* dan BPS

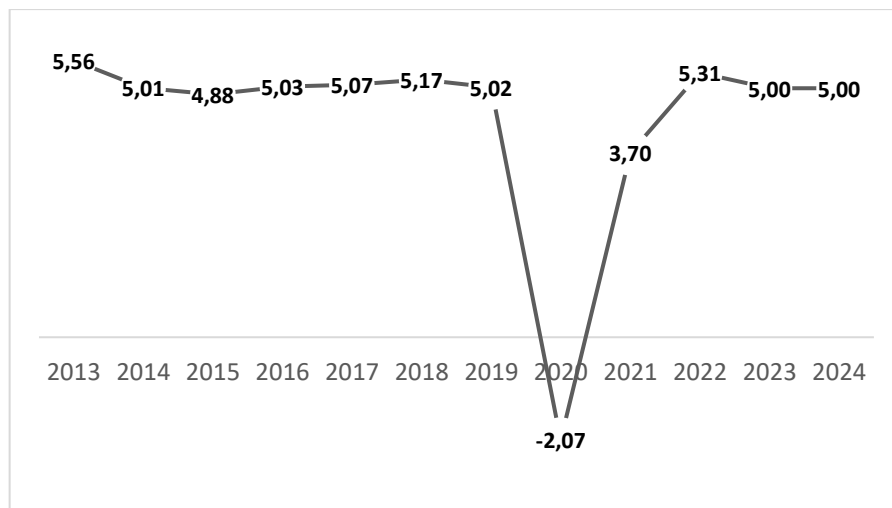
Gambar 1.1 Persentase Penduduk Miskin Indonesia Tahun 2013-2024 (%)

Gambar 1.1 diatas menunjukkan perkembangan persentase penduduk miskin di Indonesia selama periode 2013-2024 berdasarkan dua standar pengukuran, yaitu garis kemiskinan nasional oleh BPS dan garis kemiskinan internasional oleh Bank Dunia. Kedua indikator menunjukkan tren penurunan kemiskinan dalam satu dekade terakhir, namun pandemi covid-19 pada tahun 2020 menyebabkan kemiskinan nasional sebesar 0,67% atau sekitar 2,76 juta orang. Kondisi ini menegaskan bahwa capaian kesejahteraan masyarakat masih bersifat rentan terhadap guncangan ekonomi. Perbedaan nilai antara kedua indikator juga menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan dapat bervariasi tergantung pada pendekatan pengukuran yang digunakan, sehingga kesejahteraan masyarakat perlu dilihat dari perspektif yang lebih luas.

Dalam konteks tersebut, kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh tingkat kemiskinan, tetapi juga oleh kinerja indikator ekonomi dan sosial

lainnya, salah satunya pertumbuhan ekonomi.

Para ekonom setuju bahwa meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang melebihi laju pertumbuhan penduduk akan meningkatkan pendapatan perkapita, kemudian hal ini akan berdampak pada berbagai sektor seperti berkurangnya kemiskinan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat (Andhykha dkk., 2018; Santoso & Nurzaman, 2020; Seran, 2012). Pertumbuhan ekonomi dapat menjadi salah satu indikator dalam menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara melalui jumlah produk (barang atau jasa) atau output nasional yang dihasilkan dalam periode tertentu.

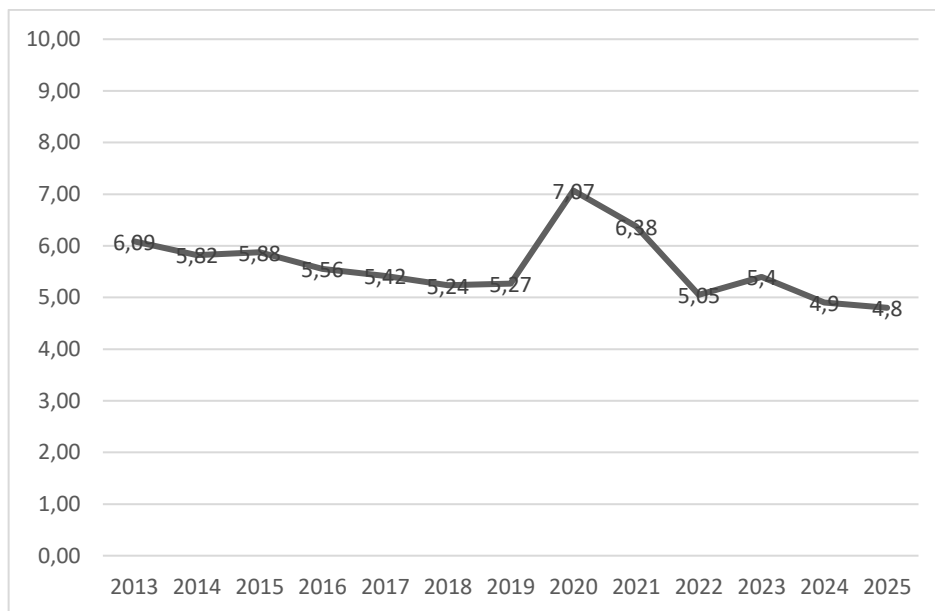


Sumber Data: *World Bank*

Gambar 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2013-2024 (%)

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa pertumbuhan PDB Indonesia atas dasar harga konstan dalam satu dekade terakhir cenderung stabil dan positif dengan rata-rata sekitar 5% per tahun. Namun, pada tahun 2020 perekonomian mengalami penurunan baik lingkup global maupun domestik, hal ini berhubungan dengan adanya penyebaran *virus corona* (Covid-19) dan kebijakan yang dilakukan oleh

pemerintah guna menanggulangi pandemi Covid-19 seperti kebijakan pemberlakuan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) di beberapa wilayah di Indonesia. Kebijakan tersebut mengakibatkan adanya kejutan (*shock*) baik dari sisi permintaan maupun penawaran yang berhubungan dengan menurunnya output nasional (Baznas, 2020). Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani (2020), *virus corona* (Covid-19) mengakibatkan krisis yang jauh lebih kompleks dibanding krisis 1997-1998 dan 2008-2009.



Sumber data: BPS

Gambar 1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia Tahun 2013-2025 (%)

Ketika PDB tumbuh dengan kuat, lapangan kerja kemungkinan besar akan meningkat karena perusahaan mempekerjakan lebih banyak pekerja dan pendapatan masyarakat atau uang yang beredar di masyarakat juga akan meningkat, kemudian hal ini akan mempengaruhi paritas daya beli masyarakat. Begitu juga sebaliknya, ketika pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan atau ketika perekonomian lesu akan berhubungan dengan meningkatnya tingkat pengangguran.

Jika dilihat dari segi fluktuasi selama periode 2013-2025 tingkat pengangguran terbuka Indonesia cenderung konstan yakni dengan rata-rata 5% terkecuali pada masa pandemi Covid-19 dimana terjadi kenaikan secara signifikan yakni sebesar 34%. Dampak Covid-19 (2020) menghasilkan 29,12 juta penduduk usia kerja yang terdampak yakni pengangguran karena Covid -19 sebesar 2,56 juta orang, Bukan Angkatan Kerja (BAK) sebesar 0,76 juta orang dan penduduk bekerja yang mengalami berkurangnya jam kerja sebesar 24,03 juta orang. Kemudian pada agustus 2020 terjadi perubahan dalam indikator yang digunakan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) sehingga terjadi kenaikan pada jumlah Angkatan kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebanyak 2,36 juta orang dan 0,24 persen poin (BPS, 2020). Pengangguran yang tinggi akan menyebabkan produktivitas dan pendapatan menurun yang kemudian akan menimbulkan permasalahan sosial seperti kemiskinan dan masalah sosial lainnya.

Pemerintah sadar akan pentingnya menjaga tingkat konsumsi masyarakat melihat dampak yang cukup besar terhadap perekonomian negara. Dengan berkurangnya konsumsi masyarakat secara signifikan pada masa pandemi Covid-19, hal tersebut mempengaruhi permintaan terhadap barang dan jasa, perusahaan mengurangi jumlah karyawan sehingga meningkatnya pengangguran, kemudian harga- harga terhadap komoditas juga meningkat, kemiskinan juga bertambah dan masalah sosial ekonomi lainnya, hal ini saling berkaitan (Zevaya, 2020). Pemulihan Ekonomi Sosial (PEN) juga merupakan program perlindungan sosial yang berperan penting pada saat pandemi Covid-19, pada tahun 2020 pemerintah mengalokasikan 203,9 triliun rupiah yang digunakan guna menjaga tingkat konsumsi masyarakat

berpenghasilan rendah (Sasongko, 2020). Pada masa pandemi Covid-19 negara dengan pendapatan menengah keatas dan tinggi dapat mengalami penurunan kemiskinan yang sebagian besarnya dipengaruhi oleh penerapan program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah maupun lembaga sosial (BPS). Berdasarkan laporan dari negara-negara anggota *World Zakat Forum (WZF)* yang dipublikasikan oleh BAZNAS RI, zakat juga berperan dalam menanggulangi dampak dari Covid-19. Indonesia yang merupakan salah satu anggota tercatat telah memberikan kontribusi melalui dua program yakni program darurat kesehatan dan darurat sosial ekonomi dengan total penyaluran dana sebesar 637 miliar rupiah yang mencakup penerima bantuan lebih dari 5 juta orang (BAZNAS *Center of Strategic Studies*, 2020).

Zakat juga berfungsi sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan, hal ini tercantum didalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 di dalam Pasal 3B tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan Masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Islam mengajarkan bahwa harta tidak boleh hanya dikuasai oleh orang kaya saja karena dipercaya bahwa didalam harta tersebut terdapat haknya orang miskin (Al-Qurán 59:7). Zakat dapat mempengaruhi perekonomian negara pada tingkat makroekonomi, melalui distribusi zakat terdapat perpindahan pendapatan (kekayaan) yang akan mendorong terjadinya pemerataan pendapatan. Kemudian penerima zakat atau mustahik akan mengonsumsi zakat tersebut sehingga permintaan agregat akan meningkat, bertambahnya lapangan kerja, mengurangi kemiskinan kemudian hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi (Bouanani & Belhadj, 2019; Choudhury & Harahap, 2008). Badan Amil

Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Menurut *The Royal Islamic Strategic Studies Center* (2022), tercatat terdapat 231,06 juta penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam atau sekitar 87% dari total penduduk Indonesia. Hal ini dapat memberikan dampak kepada peluang zakat di Indonesia jika seluruh umat Muslim di Indonesia yang telah memenuhi *nisab* melaksanakan zakat dan didistribusikan secara optimal.

Tabel 1.1 Dana Zakat BAZNAS Tahun 2013-2024 (Miliar Rupiah)

Tahun	Akumulasi Zakat	Distribusi Zakat
2013	50,74	45,07
2014	69,87	64,27
2015	88,27	66,77
2016	97,64	67,73
2017	138	118,07
2018	153	191,97
2019	248,34	225,7
2020	305,35	290,14
2021	448,11	425,61
2022	546,4	530,6
2023	649,6	610
2024	874	879

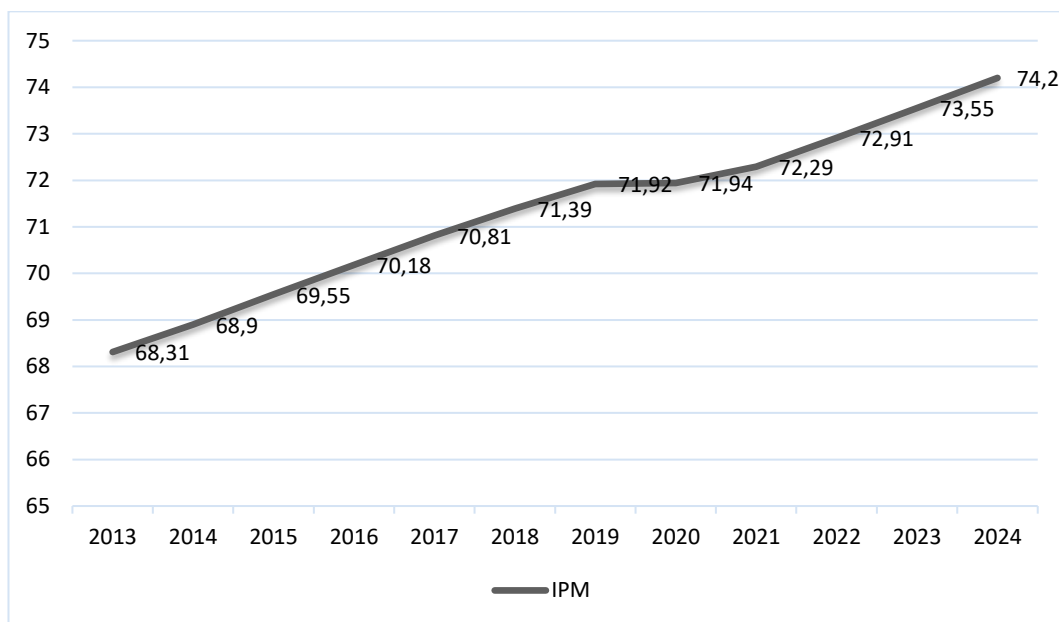
Sumber data: BAZNAS

Pada tahun 2022 BAZNAS RI maupun BAZNAS dan LAZ di daerah telah menyalurkan dana yang dihimpun dari para muzaki hampir mendekati sempurna dengan tingkat efektivitas mencapai 93,83% atau dengan angka yang menyentuh 20 triliun rupiah dan telah berhasil meningkatkan pengumpulan ZIS-DSKL (Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya) sebesar 52,14% atau dengan nilai sebesar 21,3 triliun rupiah (Priyo, 2022). Sehingga dana sosial keagamaan

seperti ZIS-DSKL dapat menjadi salah satu alat untuk memutarakan perekonomian masyarakat disuatu negara yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberdayakan delapan kelompok tertentu dalam masyarakat, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fi Sabilillah dan Ibnu Sabil sebagaimana tercantum dalam Surah At-Taubah ayat ke-60 sehingga zakat menyumbang manfaat terhadap aspek ekonomi dan juga sosial dimasyarakat (Muljawan dkk., 2016).

Pascapandemi Covid-19 ditemukan bahwa terdapat 160 negara berkembang yang mengalami pertumbuhan ekonomi secara konsisten akan tetapi 40% dari subjek penelitian tidak mengalami penurunan dalam kemiskinan (Ecker dkk., 2023). Sehingga ketika negara mengalami pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk miskin ekstrim justru meningkat. Pertumbuhan ekonomi tidak menjangkau masyarakat miskin dikarenakan tingginya kesenjangan kekayaan atau pendapatan antar kelompok masyarakat kaya dan miskin. Negara dengan kelompok pendapatan miskin atau termiskin mengalami krisis yang lebih dalam dan lebih panjang dibandingkan negara dengan kelompok pendapatan menengah atas yang disebabkan karena menurunnya pendapatan secara signifikan (Páramo dkk., 2021). Pertumbuhan ekonomi dalam ekonomi Islam tidak hanya berindikasi dengan penambahan produksi tetapi juga dengan pemerataan pendapatan, tercapainya jaminan sosial dan terciptanya kesejahteraan masyarakat secara nasional atau menyeluruh (Widiastuti dkk., 2022; Widayatama dkk., 2020; Zahro, 2017; Zainuddin, 2017). Sehingga pertumbuhan ekonomi akan disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih meluas (*growth with equity*).

Keberhasilan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dapat diukur salah satunya melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dimana didalamnya terdapat beberapa dimensi hasil pembangunan seperti memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan (Nurmainah, 2013). Pembangunan manusia ialah proses perluasan pilihan bagi penduduk, jika pembangunan dipercepat melalui pemerataan akses terhadap dimensi-dimensi yang terkait maka hal ini akan berdampak dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui produktivitas dan kesempatan kerja masyarakat (Arwani & Wahdati, 2020). IPM juga merupakan data strategis bagi pemerintah Indonesia sebagai ukuran kinerja pemerintah juga sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) (BPS, 2015).



Sumber data: BPS

Gambar 1.4 Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (2013-2024)

Gambar 1.4 menunjukkan sepanjang periode 2013-2024 IPM Indonesia secara nasional cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya dan stabil. Pada

saat pandemi Covid-19 yakni antara tahun 2019-2022 nilai IPM Indonesia tetap mengalami peningkatan. Walaupun peningkatan belum secara signifikan yakni dengan rata-rata pertumbuhan hanya sebesar 1% pertahun. Berdasarkan data penyaluran dana BAZNAS RI dapat dilihat terdapat lima bidang program utama penyaluran yaitu kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan dakwah-advokasi. Program-program tersebut sejalan dengan dimensi dasar pembentuk indeks pembangunan manusia sehingga hal ini akan mendorong bertambahnya perluasan pilihan bagi masyarakat.

Berdasarkan penelitian sebelumnya (Tawakkal dkk., 2023; Rusanti dkk., 2023) distribusi dana zakat berpengaruh signifikan terhadap peningkatan IPM melalui distribusi dimensi pendidikan dan kemanusiaan juga dalam mengurangi kemiskinan. Kemudian zakat juga mempromosikan TPB dengan mengurangi kemiskinan, kelaparan, meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan mustahik (Alfiani & Akbar, 2020; Hamid & Jamaluddin, 2023; Muhammad & Al-Shagdari, 2024; Suprayitno dkk., 2017). Indonesia merupakan salah satu negara anggota PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang berperan aktif dalam pencapaian TPB (JDIH BPK, 2017). Dalam mendorong kegiatan ini salah satu langkah yang diambil pemerintah Indonesia ialah diterapkannya beberapa peraturan keuangan berkelanjutan seperti Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, terdapat peran ekonomi dan keuangan syariah didalam TPB sebagai pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan (zakat, infak, sedekah dan wakaf) karena dianggap sudah sejalan dengan TPB. Sehingga secara alamiah

keuangan syariah akan menjadi pendorong dalam mencapai sasaran-sasaran TPB di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah dan beberapa penelitian terlebih dahulu, penulis tertarik melaksanakan tujuan penelitian yang mengkaji lebih dalam mengenai dampak distribusi KSI (Keuangan Sosial Islam) melalui Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL) terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui beberapa indikator kesejahteraan yaitu tingkat kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial di Indonesia pada periode 2019-2023.

1.2. Rumusan Masalah

Menurut latar belakang yang telah diuraikan diatas, sehingga dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh distribusi KSI terhadap IPM di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh distribusi KSI terhadap kemiskinan di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh distribusi KSI terhadap pengangguran di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh distribusi KSI terhadap pendidikan di Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh distribusi KSI terhadap kesehatan di Indonesia?
6. Bagaimana pengaruh distribusi KSI terhadap kesejahteraan sosial di Indonesia?
7. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap IPM di Indonesia?
8. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Indonesia?

9. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran di Indonesia?
10. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pendidikan di Indonesia?
11. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesehatan di Indonesia?
12. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan sosial di Indonesia?
13. Bagaimana pengaruh distribusi KSI melalui IPM terhadap kemiskinan di Indonesia?
14. Bagaimana pengaruh distribusi KSI melalui IPM terhadap pendidikan di Indonesia?
15. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi melalui IPM terhadap kemiskinan di Indonesia?
16. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi melalui IPM terhadap pendidikan di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Menurut latar belakang serta rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh distribusi KSI terhadap IPM di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh distribusi KSI terhadap kemiskinan di Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh distribusi KSI terhadap pengangguran di

Indonesia.

4. Untuk menganalisis pengaruh distribusi KSI terhadap pendidikan di Indonesia.
5. Untuk menganalisis pengaruh distribusi KSI terhadap kesehatan di Indonesia.
6. Untuk menganalisis pengaruh distribusi KSI terhadap kesejahteraan sosial di Indonesia.
7. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap IPM di Indonesia.
8. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Indonesia.
9. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran di Indonesia.
10. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pendidikan di Indonesia.
11. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesehatan di Indonesia.
12. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan sosial di Indonesia.
13. Untuk menganalisis pengaruh distribusi KSI melalui IPM terhadap kemiskinan di Indonesia.
14. Untuk menganalisis pengaruh distribusi KSI melalui IPM terhadap pendidikan di Indonesia.

15. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi melalui IPM terhadap kemiskinan di Indonesia.

16. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi melalui IPM terhadap pendidikan di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan secara empiris terutama mengenai analisis dampak keuangan sosial Islam terutama dalam mengentaskan permasalahan kemiskinan, kesejahteraan dan sosio-ekonomi lainnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan penelitian ilmiah yang nantinya dapat digunakan sebagai wawasan atau rujukan bagi peneliti selanjutnya.

Secara praktis, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan bagi pemerintah serta lembaga-lembaga yang terkait dalam menentukan kebijakan, sehingga diharapkan zakat dapat menjadi salah satu bentuk program pilihan atau alternatif dalam mengentaskan kemiskinan atau masalah sosio-ekonomi lainnya terutama di Indonesia.

1.5. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan tesis ini terdiri dari lima (5) bab. BAB I: Pendahuluan. Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah dengan menguraikan mengapa penelitian ini menarik untuk diteliti, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang digunakan.

BAB II: Kajian Pustaka Dan Landasan Teori. Pada bab ini membahas

mengenai landasan teori yang digunakan dalam penelitian. Bagian ini dimulai dengan penelitian terdahulu, landasan teori yang berkaitan dengan tema penelitian, kerangka pemikiran penelitian kemudian pengembangan hipotesis.

BAB III: Metodologi Penelitian. Pada Bab ini menjelaskan mengenai metode analisis yang digunakan dalam penelitian, jenis dan sifat penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data penelitian, serta Teknik pengumpulan data yang digunakan beserta sumbernya.

BAB IV: Hasil Dan Analisis. Pada bab ini membahas mengenai hasil dari pengujian data, pengujian hipotesis dan pembahasan dari hasil pengolahan data yang diperoleh tersebut.

BAB V: Kesimpulan. Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi secara umum menggambarkan suatu proses peningkatan produksi barang dan jasa di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dan meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat. Pada tingkat negara hal ini dapat dijelaskan melalui meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) atau PNB riil. Sehingga pertumbuhan ekonomi dapat menjadi alat ukur tercapainya pembangunan ekonomi (Sukirno, 1994). PDB dapat diukur dari sisi permintaan agregat dengan jumlah konsumsi yang dikeluarkan oleh masing-masing komponen negara (misalnya publik; pemerintah; sektor swasta; dan keterbukaan perdagangan) dan sisi penawaran agregat berupa output yang dihasilkan dari masing-masing lapangan usaha (Siswantoro & Ikhwan, 2023).

Permintaan agregat atau seluruh pengeluaran yang dikeluarkan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk membeli barang dan jasa sangat menentukan keadaan ekonomi di suatu wilayah dalam teori pertumbuhan ekonomi Keynesian. Ketika permintaan agregat melebihi penawaran agregat (seluruh output yang diproduksi), hal ini menggambarkan kekurangan produksi yang akan menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa. Sebaliknya ketika penawaran agregat melebihi permintaan agregat, hal ini menggambarkan kelebihan produksi yang akan menyebabkan menurunnya harga barang dan jasa (Terra dkk., 2021).

Teori pertumbuhan ekonomi Keynesian, pertumbuhan ekonomi sangat

dipengaruhi oleh konsumsi masyarakat, investasi perusahaan, pengeluaran pemerintah, dan kegiatan keterbukaan perdagangan (ekspor-impor) dalam system ekonomi terbuka. Keynes mengembangkan sebuah model persamaan ekonomi makro sebagai berikut:

$$Y = C + I + G + (X - M) \quad (1)$$

Dimana:

Y: Pertumbuhan ekonomi

C: Konsumsi masyarakat

I: Investasi

G: Pengeluaran pemerintah

E: Ekspor

I: Impor

Model persamaan di atas menjelaskan bahwa ketika terjadi peningkatan pada komponen pertumbuhan ekonomi seperti kegiatan konsumsi masyarakat, investasi perusahaan, belanja pemerintah, dan ekspor neto maka akan terjadi peningkatan pada produksi barang atau jasa dan sebaliknya (Terra dkk., 2021). Ketikan konsumsi masyarakat meningkat maka perekonomian sedang berjalan dan hal ini akan mendorong meningkatnya jumlah produksi guna memenuhi permintaan (Hidayat & Astuti, 2021). Kegiatan investasi dapat menghasilkan investasi yang dapat meningkatkan persediaan modal. Dengan meningkatkan persediaan modal, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk (Dinh dkk., 2019). Belanja pemerintah dapat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya pada infrastruktur dan sumber daya manusia (Kim dkk., 2021).

Keterbukaan perdagangan (ekspor neto) dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas melalui transfer teknologi, peningkatan investasi, dan perubahan struktur angkatan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri (Abid, 2020).

Jika pertumbuhan ekonomi diikuti oleh perubahan dalam aspek lainnya seperti perkembangan dalam pendidikan, perkembangan dalam kecakapan bekerja, perbaikan teknologi serta meningkatnya taraf kehidupan masyarakat dan dialami secara berkepanjangan disebut dengan pembangunan ekonomi (Sukirno, 1994). Kemudian didalamnya juga termasuk upaya pengurangan atau peniadaan kemiskinan, ketimpangan, pengangguran atau disebut dengan redistribusi hasil pertumbuhan (Todaro & Smith, 2009). Pembangunan ekonomi merupakan aspek penting dalam pembangunan suatu negara dan bersifat multidimensi, sehingga pendekatan yang digunakan tidak hanya berfokus kepada ekonomi saja tetapi juga perlu memperhatikan dimensi sosial. Selain itu, pendekatan pembangunan ekonomi yang hanya berfokus pada ekonomi akan meningkatkan kemiskinan absolut dan kesenjangan distribusi pendapatan (Mahri dkk., 2021).

Kemudian jika ingin melihat pertumbuhan ekonomi pada tingkat suatu daerah (regional), melihat keberhasilan implementasi program-program pembangunan melalui kebijakan pemerintah dalam suatu periode tertentu dapat dilihat dengan PDRB (Saputro & Sidiq, 2020). PDRB ialah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang

dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar.

2.1.2. Keuangan Sosial Islam

Kepimpinan Nabi Muhammad SAW dan para khalifah pada masa negara Islam awal telah memberikan historis bagaimana keuangan Islam guna keadilan sosial diterapkan. Penyaluran zakat yang efektif dan efisien pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz berhasil mengatasi kemiskinan (Choiriyah dkk., 2020). Keberhasilan tindakan ini tercermin ketika para pembayar zakat tidak dapat menemukan penerima zakat selama pemerintahan Khalifah (Farooq, 2008) akan tetapi menurut menurut (Kahf, 1999) penerapan zakat saja tidak dapat mengurangi kemiskinan atau masalah sosial lainnya.

Para fukaha dalam karya-karya klasik mereka sejak abad kedua hijriyah dan seterusnya telah sepakat bahwa zakat saja tidak dapat memenuhi kebutuhan orang miskin, sehingga diperlukannya penerapan pajak tambahan kepada orang kaya. Terdapat penekanan terhadap Infak dalam Al-Qurán dan Sunnah, hal ini menjadi indikasi bahwa semua tanggung jawab kesejahteraan sosial tidak dapat diberatkan kepada zakat saja. Hal ini juga didukung dengan diadopsinya konsep wakaf dan perluasannya hingga mencakup berbagai bidang seperti kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam mengentaskan kemiskinan. Sehingga hal ini memberikan ideologi baru tentang solidaritas sosial dan saling mendukung antara Zakat, Sedekah dan Wakaf.

Keuangan sosial Islam secara umum terdiri dari tiga instrumen, yaitu Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS), Wakaf, dan Keuangan Mikro Islam (Hamed, 2020). Menurut Obaidullah dalam (Ascarya & Sakti, 2022) terdapat banyak pendekatan dalam Islam terkait penanggulangan kemiskinan antara lain sedekah, penghindaran utang, pemberdayaan ekonomi, akad-akad yang sesuai dengan syariah (tidak ada riba), prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan keuangan mikro, kerjasama, dan solidaritas.

2.1.2.1. Zakat

Berdasarkan bahasa zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti suci, baik, tumbuh dan berkembang. Didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan (Fikih Sunnah, Sayyid Sabiq:5). Makna zakat dalam arti "tumbuh" menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat berperan sebagai penyebab berkembangnya harta; pelaksanaan zakat mendatangkan keberkahan berupa bertambahnya pahala. Sementara itu, makna "suci" dalam zakat mengindikasikan bahwa zakat berfungsi mensucikan jiwa dari keburukan, kebatilan, dan membersihkan dari dosa-dosa. Dalam surat At-taubah ayat 103 disebutkan "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka".

Imam Nawawi mendefinisikan zakat sebagai hak yang harus dikeluarkan dari harta tertentu milik individu yang mencapai nisab kepada golongan yang berhak, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Imam Nawawi juga menjelaskan bahwa zakat adalah bagian dari rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh umat

Muslim. Menurut Quraish Shihab (2001), zakat adalah kewajiban yang dikeluarkan dari harta yang telah mencapai nisab (jumlah minimum), dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Zakat, dalam pandangannya, merupakan instrumen penting untuk menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Kementerian Agama RI mendefinisikan zakat sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerima sesuai syariat Islam. Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam undang-undang untuk memastikan efektivitas distribusi zakat kepada yang membutuhkan. (UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)

Sehingga dari beberapa definisi diatas mengenai pengertian zakat dapat disimpulkan mengenai pengertian zakat. Zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim (yang memiliki harta minimal memenuhi nisab) untuk diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Dengan tujuan sebagai bentuk ibadah guna mensucikan diri maupun harta yang dimiliki bagi umat muslim tersebut.

A. Dasar Hukum

1. Al-Qurán

Dasar hukum zakat atau dalil dalil yang berkenaan dengan zakat terdapat didalam Al Qurán dan hadist, diantaranya :

Surah Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : “Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”

Surah At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

2. Hadis

Disamping ayat-ayat Al-Qurán terdapat juga hadis yang menjelaskan kewajiban berzakat, antara lain :

- a. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim: “Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan dan haji ke Baitullah bagi yang mampu.” (HR. Bukhari Muslim).
- b. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim: “Barangsiapa yang diberi harta oleh Allah lalu ia tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat hartanya itu akan dijadikan seekor ular besar yang berbisa yang akan melilit lehernya, kemudian ular itu akan menggigit kedua pipinya sambil berkata: Aku hartamu, aku simpananmu.” (HR. Bukhari Muslim).

B. Jenis Zakat

Secara umum zakat terbagi menjadi dua jenis, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Zakat Fitrah ialah zakat jiwa (Zakat Al-Nafs), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik laki-laki maupun perempuan muslim yang dilakukan pada

bulan Ramadhan hingga menjelang shalat Idul Fitri.

Zakat mal ialah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya, tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 yang telah diubah dua kali dengan perubahan kedua adalah Peraturan Menteri Agama No. 31/2019, dan pendapat Syaikh Dr. Yusuf Al-Qardhawi serta para ulama lainnya.

C. Asnaf (8 Golongan) penerima zakat.

Berkaitan dengan syariah, ada delapan kelompok orang yang berhak menerima dana zakat. Menurut Al-Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, terdapat golongan yang telah diberikan ketentuan oleh Allah SWT yang berhak dalam menerima zakat yaitu sebagai berikut:

- a) Fakir: Orang yang hampir tidak memiliki apa pun sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok hidupnya.
- b) Miskin: Orang yang memiliki sedikit harta, tetapi tidak cukup untuk memenuhi keperluan dasar kehidupannya.
- c) Amil: Mereka yang bertugas mengumpulkan serta menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya.
- d) Muallaf: Orang yang baru masuk Islam dan memerlukan dukungan agar semakin kuat dalam akidah dan syariat.
- e) Riqab: Hamba sahaya atau budak yang berupaya untuk membebaskan dirinya.
- f) Gharimin: Mereka yang memiliki utang yang digunakan untuk memenuhi

kebutuhan pokok, guna mempertahankan hidup dan martabatnya.

- g) Fisabilillah: Orang yang berjuang di jalan Allah melalui kegiatan dakwah, jihad, atau bentuk lain yang serupa.
- h) Ibnu Sabil: Musafir atau orang dalam perjalanan yang kehabisan biaya dalam usaha yang taat kepada Allah.

2.1.2.2. Infak

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada BAB I Pasal 1, infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Kata infak dalam Bahasa arab berasal dari kata “anfaqa” yang memiliki arti membelanjakan harta atau memberikan harta, sedangkan arti dari infak ialah keluarkanlah harta. Berdasarkan tujuannya infak dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yakni infak untuk kebaikan dan infak untuk keburukan. Infak untuk kebaikan ialah infak yang dilakukan atau dibelanjakan untuk di jalan Allah dan harta yang digunakan juga berasal dari hal baik. Sebaliknya infak untuk keburukan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an surah Al-Anfal ayat 36 yang artinya sebagai berikut: “Sesungguhnya orang-orang yang kufur menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan (terus) menginfakkan harta itu, kemudian (hal itu) menjadi (sebab) penyesalan yang besar bagi mereka. Akhirnya, mereka akan dikalahkan. Ke (neraka) Jahanamlah orang-orang yang kufur itu akan dikumpulkan”.

Dalam Al-Qur’an surah Ali Imran ayat 133-134 dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan setiap hambanya agar menyisihkan hartanya untuk berinjak

yang hal ini masuk dalam kebaikan, dan Allah mencintai hambanya yang berbuat baik. Infak dilakukan dengan harta atau material, hal ini berbeda dengan sedekah dimana sedekah dapat dilakukan dengan non-harta atau non-material. Contoh sedekah non-harta atau non-material ialah dengan senyuman, “Senyummu terhadap wajah saudaramu adalah sedekah.” (HR. Tirmidzi).

2.1.2.3. Sedekah

Menurut peraturan BAZNAS No.2 tahun 2016, sedekah adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Kata sedekah berasal dari kata Bahasa arab yaitu “shadaqah” yang berasal dari kata sidq (sidiq) yang memiliki arti “kebenaran”. Sedekah banyak disebutkan didalam Al-Al-Qur’an, hal ini membuktikan bahwa sedekah merupakan amalan yang dicintai Allah SWT.

Sedekah merupakan manifestasi dari prinsip keadilan sosial di mana yang kaya membantu yang miskin, sehingga tercipta keseimbangan dalam masyarakat. Bagi penerima, sedekah dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan taraf hidup. Bagi pemberi, sedekah membersihkan harta, menghapus dosa, dan mendatangkan berkah serta rezeki yang lebih banyak.

2.1.2.4. Manajemen Zakat di Indonesia

Dengan terbentuknya BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai lembaga pengelola zakat di Indonesia, hal ini dapat mencerminkan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat. BAZNAS merupakan satu-satunya lembaga zakat resmi milik pemerintah yang didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 2001. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, peran BAZNAS semakin diperkuat sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk berkoordinasi dengan semua lembaga zakat di Indonesia dalam menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah secara nasional.

Dalam pengelolaannya, BAZNAS melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional. Visi BAZNAS ialah menjadi lembaga utama menyejahterakan umat. Langkah-langkah dan strategi BAZNAS dalam mencapai visi tersebut, antara lain sebagai berikut:

- a. Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat.
- b. Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur.
- c. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial.
- d. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan.
- e. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur.
- f. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional.

- g. Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
- h. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional dan
- i. Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.

BAZNAS Provinsi adalah lembaga yang dibentuk Menteri Agama Republik Indonesia atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS Provinsi berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat ditingkat provinsi. BAZNAS Kabupaten/Kota adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di tingkat kabupaten/kota. Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam beroperasi ditahun 2023 tercatat terdapat 702 Pengelola Zakat yang terdiri dari 1 BAZNAS (pusat), 34 BAZNAS Provinsi, 514 BAZNAS Kabupaten/Kota, dan 153 LAZ. Secara kelembagaan BAZNAS (pusat) memiliki struktur yang terpisah dengan seluruh OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) resmi diatas, BAZNAS (pusat) tidak memiliki kewenangan yang bersifat hirarkis dan instruktif kepada BAZNAS Provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota, hubungan kelembagaan bersifat koordinasi dan konsultasi. Kemudian hubungan kelembagaan dengan BAZNAS (pusat) dengan LAZ hanya bersifat koordinatif.

Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) adalah dana sosial keagamaan dalam Islam antarlain harta nazar, harta amanah atau titipan, harta pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kurban, kafarat, *fidyah*, hibah, harta sitaan dan biaya

administrasi peradilan dipengadilan agama. Pendayagunaan adalah bentuk pemanfaatan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga berdaya guna untuk mencapai kemaslahatan umum. Pendistribusian adalah penyaluran zakat kepada mustahik dalam bentuk konsumtif. Penyaluran ZIS-DSKL bersifat desentralisasi, penyaluran diprioritaskan di wilayah ZIS-DSKL dikumpulkan.

Berdasarkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ wajib menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan ZIS-DSKL. Laporan tersebut terdiri atas laporan enam bulan (1 Januari sampai dengan 30 Juni tahun berjalan) dan laporan akhir tahun (1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan). Laporan tersebut terdiri dari laporan kinerja, keuangan dan Zakat wilayah. Laporan zakat wilayah merupakan rekapitulasi laporan pelaksanaan ZIS-DSKL seluruh kabupaten/kota, provinsi, atau nasional sesuai dengan tingkatannya.

BAZNAS melalui program-programnya untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia antara lain yaitu Beasiswa Cendekia BAZNAS dalam negeri, Sekolah Cendekia BAZNAS, Beasiswa khusus, beasiswa riset, Beasiswa riset Mazawa, Beasiswa Santri, Beasiswa Dikdasmen, dan Beasiswa Cendekia BAZNAS luar negeri.

2.1.3. Keuangan Sosial Islam dan Pertumbuhan Ekonomi

Keuangan Islam pada hakikatnya merujuk pada praktik keuangan yang

diatur oleh hukum Islam atau Syariah. Nilai-nilai Islam menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk mempromosikan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang berakar pada prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan dan tanggung jawab. Islam menekankan perlindungan terhadap kelompok rentan, distribusi sumber daya yang adil dan kewajiban untuk merawat mereka yang membutuhkan, yang dirangkum dalam praktik-praktik seperti zakat dan wakaf (Ali dkk., 2024).

Keuangan sosial Islam akan membuat perekonomian terus berputar menciptakan lapangan kerja, penciptaan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat berkelanjutan yang akan mendorong pembangunan ekonomi. Didalamnya terdapat sekurangnya 5 (lima) ciri-ciri pembangunan, yakni; menyeluruh yang meliputi aspek moral, spiritual, dan material bagi kehidupan manusia, pembangunan manusia, aspek fisik, dan lingkungan sosial budaya (Saputro & Sidiq, 2020).

Islam mendorong terjadinya pertumbuhan yang berpihak pada orang miskin (*pro-poor growth*) melalui dua jalur utama yakni dengan dilarangnya riba dan mendorong kegiatan sektor riil. Inflasi akan dikendalikan secara efektif oleh larangan riba sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan menghasilkan stabilitas ekonomi. Kemudian Islam mendorong penggunaan modal dalam kegiatan ekonomi yang produktif melalui kerja sama ekonomi dan bisnis seperti mudharabah, muara'ah, dan musaqat. Pendekatan ini menciptakan keseimbangan antara sektor riil dan sektor moneter, yang pada akhirnya memungkinkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (Kahar dkk., 2022).

Menurut Mohsin (2013) zakat memiliki tujuan untuk menghapuskan praktik riba dan mengurangi kesulitan di kalangan masyarakat Muslim. Pada suatu negara

perannya dapat dilakukan melalui tingkat mikro maupun makro. Pada tingkat mikro, pemenuhan salah satu rukun Islam ini memungkinkan dana zakat mencegah mustahik dari transaksi berutang dengan riba demi memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sementara itu, pada tingkat makro, dana zakat dapat membantu mencegah pemerintah dari mengambil pinjaman berbunga dari negara-negara kapitalis.

Menurut Kahf (1997) secara keseluruhan, penawaran agregat dipengaruhi oleh zakat dalam tiga: alokasi sumber daya, penawaran tenaga kerja (melalui peningkatan kesehatan, gizi dan kondisi hidup masyarakat miskin) dan produktivitas karena peningkatan produktivitas karyawan berdampak positif terhadap suplai barang di sektor ekonomi. Zakat dapat berperan sebagai kebijakan fiskal dalam Islam sebagai instrumen redistribusi pendapatan dalam perekonomian suatu negara (Al-Mamun dkk., 2020). Zakat dapat merangsang konsumsi agregat melalui inklusi keuangan penerima zakat atau masyarakat miskin, daya beli masyarakat meningkat dan pengeluaran konsumsi agregat, sehingga memacu produksi dan pertumbuhan ekonomi (Owoyemi, 2020). Zakat sebagai penggerak permintaan agregat dan sebagai pencegah faktor-faktor produksi yang tidak produktif (penimbunan harta) dalam perekonomian melalui kegiatan investasi (Saad & Farouk, 2019). Zakat dapat memperkuat belanja pemerintah sebagai alternatif pembiayaan dalam pengeluaran anggaran pemerintah sehingga dana tersebut dapat digunakan untuk pengeluaran pembangunan lainnya (Jedidia & Guerbouj, 2021).

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu tujuan dari pertumbuhan ekonomi dalam ekonomi Islam, pembangunan ekonomi yang dimaksud ialah

pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang merata (*growth with equality*) (Zahro, 2017).

2.1.4. Kemiskinan

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (1988) mendefinisikan kemiskinan sebagai “pelanggaran martabat manusia dimana manusia tidak memiliki pilihan dan kesempatan”. Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan “sebagai seseorang yang tidak memiliki kesejahteraan, yang meliputi berbagai masalah yaitu pendapatan rendah, kurangnya akses ke fasilitas hidup dasar, kekurangan gizi, kurangnya pendidikan dan tekanan mental” (Al-Azizah dkk., 2021).

Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya Ulum Ad-din* mendefinisikan kemiskinan yang hakiki ialah sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup pokok (Choiriyah dkk., 2020). Menurut Michael Sherraden terdapat teori penyebab kemiskinan yang saling bertentangan yakni teori struktur sosial dan perilaku (behavioral). Dalam teori struktural adanya ketimpangan kesempatan yang dihasilkan oleh hambatan struktural yang sistematis menjadi penyebab kemiskinan. Sedangkan dalam teori perilaku kemiskinan disebabkan oleh sikap individu yang tidak produktif (Latief dkk., 2022).

Kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang dianggap hidup lebih rendah dari garis kemiskinan atau standar kemiskinan. Garis kemiskinan dapat ditentukan melalui dua pendekatan yaitu pendekatan absolut dan pendekatan relatif. Sedangkan berdasarkan sifatnya kemiskinan terbagi menjadi dua yaitu kemiskinan sementara (*transient poverty*) dan kemiskinan kronis (*chronic poverty*) (Adji dkk., 2020). Kemiskinan sementara ialah kemiskinan yang relative singkat dan

berfluktuasi, biasanya dikarenakan keadaan perekonomian yang memburuk sedangkan kemiskinan kronis ialah kemiskinan yang berlangsung dalam waktu yang relatif lama. Bank Dunia menggunakan tiga ambang batas kemiskinan internasional untuk mengukur tingkat pendapatan atau konsumsi harian di mana orang berjuang untuk memenuhi kebutuhan subsisten dasar mereka.

Selain konsep pendekatan kemiskinan absolut dan relatif terdapat juga konsep pendekatan kemiskinan multidimensi, indikator yang digunakan ialah Indeks Kemiskinan Multidimensi atau *Multidimensional Poverty Index (MPI)*. Konsep ini diajukan oleh Kantor Laporan Pembangunan Manusia (*Human Development Report Office/HDRO*) di Inggris pada tahun 2010 dan dipublikasikan pertama kali dalam Laporan Pembangunan Manusia atau Human Development Report yang ke-20. Dalam konsep ini kemiskinan tidak hanya diukur melalui ukuran kemiskinan moneter saja tetapi juga memperhitungkan dimensi Kesehatan, Pendidikan dan standar hidup yang dihadapi seseorang secara bersamaan. MPI dapat memberikan gambaran kemiskinan secara menyeluruh seperti mengidentifikasi orang-orang yang paling rentan, yang termiskin di antara yang miskin, mengungkap pola kemiskinan di dalam suatu negara dan dari waktu ke waktu. Kemudian pada tahun 2018 MPI global direvisi agar selaras dengan TPB (OPHI, t.t.).

BPS menggunakan konsep kemiskinan berdasarkan konsep kemiskinan makro atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), dimana didalamnya terdapat kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin ialah penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita perbulan lebih kecil dari Garis Kemiskinan. Sumber data

kemiskinan yang digunakan sejak 1976 hingga sekarang ialah memakai Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).

2.1.5. Keuangan Sosial Islam dan Kemiskinan

Kemiskinan jika dilihat secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang sebenarnya bermakna kemiskinan yang amat sangat. Islam menganggap kemiskinan merupakan ancaman yang biasa dihembuskan oleh setan (Q.S. al-Baqarah [2]: 268). Tidak terpenuhinya kebutuhan pokok atau kemiskinan dapat mengakibatkan kehancuran atau kemunduran eksistensi umat manusia. Terdapat 3 (tiga) hal yang termasuk dalam kebutuhan pokok yang berhubungan dengan kelangsungan eksistensi dan kehormatan manusia yaitu sandang, pangan dan papan (Yuliansyah dkk., 2023). Islam mengatur praktik redistribusi pendapatan melalui instrumen zakat.

Menurut Kahf (1997) kedalaman kemiskinan dapat diukur salah satunya melalui kesenjangan kemiskinan, apakah cukup signifikan untuk mencapai target penanggulangan kemiskinan. Artinya, asumsi zakat harus berdasarkan pendapat Syariah yang memungkinkan hasilnya cukup signifikan untuk mencapai target dalam penanggulangan kemiskinan. Kesenjangan tersebut dapat diatasi melalui kebijakan pemerataan dan distribusi pendapatan yang berpihak pada kelompok miskin (*pro-poor income distribution*). Islam menganjurkan diterapkannya zakat agar akumulasi kekayaan pada sekelompok orang dapat dicegah. Zakat juga menjamin adanya pemenuhan kebutuhan hidup dasar bagi setiap orang, sehingga memberi mereka peluang untuk keluar dari kemiskinan. Selain itu, untuk memastikan agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang kaya, Islam

sangat mendorong para hartawan untuk memberikan qardh, infaq, dan wakaf (Kahar dkk., 2022).

Menurut para ekonom Islam, zakat secara keseluruhan akan memberikan manfaat bagi perekonomian khususnya bagi masyarakat miskin. Dimana penerima zakat ialah delapan golongan penerima zakat yang semuanya berada dalam kondisi miskin atau masyarakat rentan. Zakat berperan sebagai sarana transfer wajib pendapatan dan kekayaan antara orang kaya dan orang miskin guna meminimalkan kesenjangan dalam masyarakat. Zakat secara bertahap mampu meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan dalam perekonomian. Dampaknya, taraf hidup masyarakat ikut meningkat, yang pada akhirnya berkontribusi pada bertambahnya volume pengumpulan zakat secara keseluruhan. Dengan demikian, zakat memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan tingkat pengangguran (Sari dkk., 2019).

Pada dasarnya, penyaluran zakat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif, yang berperan dalam menciptakan kesejahteraan dengan mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Zakat konsumtif disalurkan langsung kepada mereka yang membutuhkan kebutuhan dasar, seperti makanan, air bersih, pakaian, dan tempat tinggal. Di sisi lain, zakat produktif memberikan manfaat jangka panjang karena dialokasikan dalam bentuk modal usaha, peralatan, dan dukungan usaha lainnya sesuai dengan kebutuhan penerima zakat (Mawardi dkk., 2023).

2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia merupakan sebuah proses perluasan pilihan-pilihan bagi

penduduk (UNDP, 1995). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperkenalkan pada tahun 1990 oleh UNDP (*United Nations Development Programme*) yang kemudian dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan HDR (*Human Development Report*). IPM terdiri dari 3 (tiga) dimensi dasar yakni umur panjang dan hidup sehat (kesehatan), pengetahuan (pendidikan) dan standar hidup layak (biaya). Melalui IPM dapat terukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk/Masyarakat), dapat menentukan peringkat pembangunan suatu wilayah/negara serta dapat menjadi data ukuran kinerja pemerintah. Secara umum, klasifikasi yang sering digunakan dalam laporan UNDP adalah sebagai berikut:

- a. Sangat Tinggi (*Very High Human Development*): IPM lebih dari 80.
- b. Tinggi (*High Human Development*): IPM antara 70 dan 79.
- c. Sedang (*Medium Human Development*): IPM antara 60 dan 69.
- d. Rendah (*Low Human Development*): IPM di bawah 60.

Dalam pembangunan suatu negara pembangunan manusia merupakan hal yang penting. Kesejahteraan yang merata serta berkelanjutan suatu negara dapat diwujudkan dengan adanya sumber daya manusia yang memadai. Pembangunan suatu negara tidak akan berjalan dengan pesat apabila tidak disertai dengan sumber daya manusia yang baik (Todaro & Smith, 2014). Investasi sosial merupakan hal yang penting bagi suatu negara karena dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang diantaranya ialah pendidikan dan pelatihan (Khasandy & Badrudin, 2019).

2.1.7. Keuangan Sosial Islam dan Pembangunan Manusia

Zakat merupakan bagian dari upaya pemberdayaan mustahik yang dapat

dilihat dari tiga sisi. Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Kedua, memperkuat potensi daya yang dimiliki mustahik). Penguatan ini meliputi langkah-langkah konkrit, dan menyangkut pemberian berbagai input, serta pembukaan akses terhadap berbagai kesempatan seperti pendidikan, zakat mampu mengubah kondisi fiskal melalui pengetahuan dan keterampilan mustahik. Dengan demikian, kualitas tenaga kerja dan kuantitas lapangan pekerjaan dapat ditawarkan. Diharapkan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja, dapat mendorong sektor-sektor yang produktif. Ketiga, memberdayakan dalam arti melindungi. Artinya dalam proses pemberdayaan, mustahik yang tadinya lemah tak berdaya dapat menjadi seseorang yang produktif atau berdaya (Saputro & Sidiq, 2020).

Suprayitno, dkk. (2017) menyatakan bahwa zakat dapat digunakan sebagai alat penting untuk mendorong pembangunan manusia. Penyaluran zakat untuk pendidikan dan pemberdayaan sumber daya manusia mendorong kehidupan sosial penerima zakat menjadi lebih baik. Dengan demikian, peningkatan zakat dalam jangka pendek dapat meningkatkan kehidupan sosial, kualitas pendidikan, dan kualitas penerima zakat. Peningkatan kehidupan sosial yang dapat diartikan sebagai harapan dan pendidikan merupakan bagian dari indikator yang digunakan untuk mengukur IPM. Indeks Pembangunan Sumber Daya Manusia merupakan salah satu indikator penting pembangunan ekonomi bagi setiap negara dan dianggap berperan aktif dalam pembangunan ekonomi. (Suprayitno dkk., 2017).

Dalam upaya pembangunan manusia dan penanggulangan kemiskinan, BAZNAS merumuskan lima bidang utama yang diprioritaskan untuk penyaluran

zakat yang juga telah ditetapkan dalam Pedoman Pelaksanaan Penyaluran dan Pendayagunaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional.

Bidang pertama adalah ekonomi, yaitu penyediaan dana zakat yang disalurkan untuk sarana produktif terdapat 3 (tiga) jenis program yaitu ekonomi pedesaan, ekonomi perkotaan dan optimasi dan pemasaran produk. Bidang kedua adalah pendidikan, dimana BAZNAS memberikan bantuan renovasi sekolah, beasiswa tahfidz, dan beasiswa kuliah. Bidang ketiga adalah kesehatan, dimana BAZNAS menyalurkan dana zakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas kesehatan yang memadai. Keempat, advokasi dakwah, dimana penyaluran zakat pada umumnya diberikan dalam bentuk pelatihan keIslaman, pembangunan rumah ibadah, dan dakwah intensif. Terakhir, bidang kemanusiaan, dimana zakat disalurkan untuk bantuan bencana, kecelakaan, korban kekerasan, dan korban tragedi kemanusiaan lainnya. Kelima prioritas penyaluran zakat tersebut berkaitan langsung dengan indikator IPM.

Misalnya, dalam bidang pendidikan dan dakwah, hal ini mendorong peningkatan taraf pendidikan masyarakat, tidak hanya pada pendidikan dasar tetapi juga pendidikan tinggi. Hal ini juga menekan angka buta huruf yang dialami oleh masyarakat miskin. Begitu pula dalam bidang kesehatan dan kemanusiaan, masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Apabila masyarakat memperoleh pelayanan dan fasilitas kesehatan yang baik, maka akan mendorong peningkatan usia harapan hidup. Dalam bidang ekonomi, hal ini juga berdampak pada produktivitas mustahik, terutama dalam penyaluran dana zakat secara produktif dengan pengawasan yang baik dari BAZNAS. Skema ini membantu

mustahik untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya dan sekaligus terbebas dari kemiskinan (Rusanti dkk., 2023b).

2.2. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian MG, dkk. (2019) meneliti pengaruh ZIS, pengangguran dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia diperoleh bahwa ZIS berdampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan kemiskinan mempunyai dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, salah satu penyebabnya ialah kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan tidak disalurkan sesuai dengan target kebijakan. Ditemukan bahwa banyak penerima Bantuan Tunai Langsung (BLT) yang merupakan masyarakat produktif dan masyarakat berpendapatan tetap bukan masyarakat yang teregistrasi sebagai Rumah Tangga Sasaran BLT (RTSBLT) sehingga hal tersebut memperparah kesenjangan pendapatan antara rumah tangga miskin dan rumah tangga tidak miskin. Akan tetapi peningkatan pendapatan tersebut meningkatkan aktivitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sehingga ZIS dapat menjadi pertimbangan sebagai alternatif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Al Azizah, dkk. (2022) juga mendapatkan hasil bahwa zakat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Bahkan dampaknya lebih besar dibandingkan variabel makro lainnya dan jangka panjang. Penelitian ini juga merekomendasikan bahwa distribusi dana zakat tidak hanya diperuntukan dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk konsumsi masyarakat tetapi juga mencakup kebutuhan keuangan lainnya yang dapat meningkatkan

pertumbuhan ekonomi. Sulaeman, dkk. (2021) dalam penelitiannya memperoleh selain meningkatkan pertumbuhan ekonomi zakat juga terbukti berkontribusi dalam meningkatkan daya beli masyarakat serta mengurangi tingkat kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Siswanto & Ikhwan (2023) ZIS juga ditemukan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada jangka panjang tetapi tidak pada jangka pendek. Hal ini disebabkan karena dana ZIS di Indonesia lebih cenderung didistribusikan untuk keperluan konsumtif. Anindya & Pimada (2023) juga memperoleh hasil yang sama pada penelitiannya dimana dalam jangka pendek tidak ditemukan dampak dari ZIS akan tetapi ditemukan dalam jangka panjang. Hal ini dijelaskan dengan proporsi penyaluran dana zakat di Indonesia masih didominasi oleh penyaluran guna penggunaan konsumtif.

Arwani & Wahdati (2020) meneliti pengaruh ZIS dalam keadilan distribusi dan pemerataan pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian mulai mempertimbangkan tambahan variabel sosial-ekonomi yaitu IPM. Diperoleh simpulan bahwa ZIS dan IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kemudian penggunaan variabel IPM dalam penelitian hubungan antara zakat dan variabel sosio-ekonomi juga dilakukan oleh Tawakkal, dkk. (2023) menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif metode regresi *PLS*. Diperoleh simpulan bahwa penyaluran dana ZIS dan pertumbuhan ekonomi berperan signifikan dalam mengurangi kemiskinan, bahkan zakat lebih efektif untuk mengentaskan kemiskinan. Kemudian kedua variable tersebut berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Penyaluran

dana ZIS tidak berdampak signifikan terhadap pengangguran karena prioritas penyaluran sebagian besar dialokasikan untuk program penanggulangan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan.

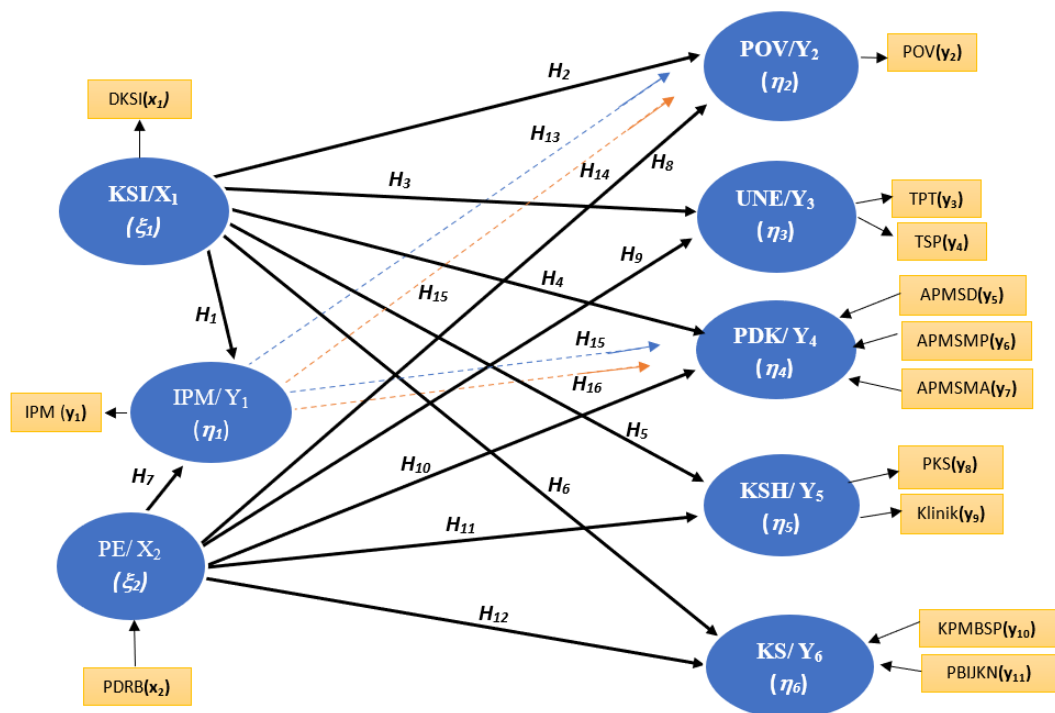
Penelitian yang dilakukan oleh Rusanti, dkk. (2023) menjelaskan bagaimana hubungan antara penyaluran dana zakat pada 5 (lima) bidang program utama BAZNAS yaitu keagamaan, ekonomi, kemanusiaan, kesehatan dan pendidikan memiliki pengaruh secara langsung terhadap indikator IPM di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat pada sektor pendidikan dan kemanusiaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan IPM di Indonesia. Sementara itu, penyaluran zakat pada bidang ekonomi, kesehatan dan keagamaan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh karakteristik zakat yang bersifat konsumtif pada sektor ekonomi, fokus pembangunan fisik pada sektor keagamaan, serta keterbatasan alokasi dana pada sektor kesehatan, sehingga dampaknya terhadap peningkatan IPM belum optimal.

Mutmainah, dkk. (2024) melakukan penelitian mengenai kompleksitas kemiskinan di Indonesia dimana didalamnya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi saja tetapi juga mempertimbangkan pengaruh dari faktor sosial dan faktor struktural. Dalam penelitian ini dijelaskan melalui variabel IPM, zakat, TPT dan upah. Zakat, IPM dan upah berpengaruh signifikan dalam mengurangi kemiskinan, TPT tidak signifikan. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan teori kemiskinan yang lebih kuat yang menggabungkan unsur-unsur seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Hasil penelitian Choiriyah, dkk. (2020) menindikasikan bahwa dampak zakat yang tercermin melalui IKB (Indeks Kesejahteraan Badan Amil Zakat Nasional) masih bersifat terbatas, yaitu efektif menurunkan proporsi penduduk miskin tetapi belum mampu mengurangi kedalaman dan keparahan kemiskinan. Hal ini mendadakan bahwa intervensi zakat cenderung menyasa ke kelompok miskin marginal, sementara kelompok miskin ekstrem belum mendapatkan manfaat yang cukup signifikan.

2.3. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pemaparan sebelumnya dari landasan teori dan penelitian terdahulu maka kerangka model untuk penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Ilustrasi Penulis

Keterangan:

KSI: Keuangan Sosial Islam (ZIS-DSKL)

DKSI: Distribusi Keuangan Sosial Islam (ZIS-DSKL)

PE: Pertumbuhan Ekonomi

POV: persentase penduduk miskin

UNE: Pengangguran

IPM: Indeks Pembangunan Manusia

KS: Kesejahteraan Sosial

TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka

TSP: Tingkat Setengah Pengangguran

APMSD: Angka Partisipasi Murni SD

APMSMP: Angka Partisipasi Murni SMP

APMSMA: Angka Partisipasi Murni SMA

PKS: Jumlah Puskesmas

Klinik: Jumlah Klinik

KPMBSP: Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Pangan

PBIJKN: Persentase Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional

2.3.1. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, landasan teori dan analisis literatur dari beberapa peneliti terdahulu yang sebelumnya telah dinyatakan maka

penelitian ini mengajukan beberapa hipotesis. Adapun beberapa hipotesis dipenelitian ini sebagai berikut:

1. Variabel X_1 (KSI) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel Y_2 (kemiskinan).
2. Variabel X_1 (KSI) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel Y_3 (pengangguran).
3. Variabel X_1 (KSI) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y_4 (pendidikan).
4. Variabel X_1 (KSI) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y_5 (kesehatan).
5. Variabel X_1 (KSI) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y_6 (kesejahteraan sosial).
6. Variabel X_1 (KSI) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y_7 (IPM).
7. Variabel X_2 (pertumbuhan ekonomi) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel Y_2 (kemiskinan).
8. Variabel X_2 (pertumbuhan ekonomi) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel Y_3 (pengangguran).
9. Variabel X_2 (pertumbuhan ekonomi) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y_4 (pendidikan).
10. Variabel X_2 (pertumbuhan ekonomi) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y_5 (kesehatan).

11. Variabel X_2 (pertumbuhan ekonomi) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y_6 (kesejahteraan sosial).
12. Variabel X_2 (pertumbuhan ekonomi) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y_1 (IPM).
13. Variabel X_1 (KSI) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel Y_2 (kemiskinan) melalui variabel Y_1 (IPM).
14. Variabel X_1 (KSI) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y_4 (pendidikan) melalui variabel Y_1 (IPM).
15. Variabel X_2 (pertumbuhan ekonomi) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel Y_2 (kemiskinan) melalui variabel Y_1 (IPM).
16. Variabel X_2 (pertumbuhan ekonomi) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y_4 (pendidikan) melalui variabel Y_1 (IPM).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Menurut Widarjono (2018) penelitian kuantitatif deskriptif merupakan salah satu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena berdasarkan data numerik yang dianalisis secara statistik. Hubungan antara variabel akan dijelaskan dengan memanfaatkan metode statistik yang relevan.

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari laman resmi BPS (Badan Pusat Statistik) dan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Periode data penelitian ialah data tahunan dari tahun 2019-2023 pada setiap variabel. Variabel yang digunakan adalah X_1 (KSI), X_2 (pertumbuhan ekonomi), Y_1 (IPM), Y_2 (kemiskinan), Y_3 (pengangguran), Y_4 (pendidikan), Y_5 (kesehatan), dan Y_6 (kesejahteraan sosial).

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek dan objek yang memiliki karakteristik dan kaulitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dikaji guna memperoleh kesimpulan penelitian (Sugiyono, 2018). Populasi pada penelitian ini adalah wilayah Provinsi di Indonesia yang dipublikasikan oleh BPS dan BAZNAS.

Sampel merupakan sutau bagian dari jumlah serta karkteristik yang terdapat pada populasi, terdapat beberapa teknik penerapan sampel. *Probability sampling* dan *nonprobaility sampling*. *Probability sampling* merupakan teknik penerapan

sampel dengan peluang yang sama pada setiap unsur populasi untuk diterapkan menjadi anggota sampel. *Nonprobability sampling* merupakan teknik penerapan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama pada setiap unsur populasi untuk diterapkan menjadi anggota sampel. Metode *nonprobability sampling* terdiri dari *sampling* sistematis, kuota, aksidental, *purposive*, jenuh, dan *snowball*. Penelitian ini menerapkan pendekatan pengambilan sampel *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013b).

Tabel 2.1 Daftar Sampel Provinsi

No	Provinsi	No	Provinsi
1	Aceh	16	Banten
2	Sumatera Utara	17	Bali
3	Sumatera Barat	18	Nusa Tenggara Barat
4	Riau	19	Kalimantan Barat
5	Jambi	20	Kalimantan Tengah
6	Sumatera Selatan	21	Kalimantan Selatan
7	Bengkulu	22	Kalimantan Timur
8	Lampung	23	Sulawesi Utara
9	Kepulauan Bangka Belitung	24	Sulawesi Tengah
10	Kepulauan Riau	25	Sulawesi Selatan
11	DKI Jakarta	26	Sulawesi Tenggara
12	Jawa Barat	27	Gorontalo
13	Jawa Tengah	28	Maluku Utara
14	DI Yogyakarta	29	Papua Barat
15	Jawa Timur	30	Papua

Sumber: BPS

Dalam penelitian ini, jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 150 sampel yang tersusun atas 30 wilayah Provinsi di Indonesia yang dipublikasikan laman resmi BPS dan BAZNAS selama periode 2019 hingga tahun 2023. Pemilihan jumlah sampel tersebut berdasarkan dua pendekatan perhitungan kebutuhan minimum sampel dalam *PLS-SEM*. Pertama dengan menggunakan aturan 10 kali

(*10 times rule*) oleh Barclay, dkk. (1995) yaitu 10 kali jumlah jalur struktural terbesar yang diarahkan pada suatu konstruk dalam model struktural ($10 * 3$) atau jumlah minimum sampel sebesar 30. Kemudian dengan *minimum R² method* oleh Cohen (1992), nilai R² terendah dalam model sebesar 0,167 dengan tiga prediktor menghasilkan ukuran efek f² sekitar 0,20 menunjukkan kebutuhan minimum sekitar 90 sampel. Berdasarkan metode *purposive sampling* tersebut sampel penelitian ini tersusun atas 30 wilayah Provinsi di Indonesia yang dipublikasikan laman resmi BPS dan BAZNAS selama periode 2019 hingga tahun 2023. Jumlah sampel dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 150 sampel.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian kepustakaan (*library research*) dan data sekunder merupakan metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini. Untuk memperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan, data yang digunakan harus diperoleh melalui metode yang tepat.

A. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian pustaka dilakukan untuk mengumpulkan informasi terkait teori-teori yang relevan dengan penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mencari referensi mengenai penelitian-penelitian serupa yang telah dilaksanakan sebelumnya. Data yang diperoleh dari penelitian pustaka dapat berupa buku, artikel, jurnal, serta literatur lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

B. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diolah oleh orang lain atau lembaga pengumpul data yang kemudian dipublikasikan kepada masyarakat secara resmi.

Data tersebut kemudian dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan atau membutuhkan (Sugiyono, 2013a). Penulis memperoleh data penelitian ini melalui instansi yang menyediakan dengan menyeleksi data sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari beberapa situs resmi yakni antara lain: Badan Pusat Statistik (BPS) untuk tingkat pengangguran terbuka, pendidikan, indeks pembangunan manusia, kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi kemudian data Keuangan Sosial Islam diperoleh dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

3.4. Variabel

Variabel merujuk pada segala hal yang dapat mempengaruhi atau membedakan perbedaan dalam nilai (Sekaran & Bougie, 2010). Dalam penelitian ini yang dijadikan variabel terikat atau dependen adalah Y_1 (IPM), Y_2 (kemiskinan), Y_3 (pengangguran), Y_4 (pendidikan), Y_5 (kesehatan), dan Y_6 (kesejahteraan sosial). Variabel bebas atau independen adalah X_1 (KSI) dan X_2 (pertumbuhan ekonomi). Berikut merupakan definisi dari variabel yang digunakan dalam penelitian, antara lain yaitu:

A. Keuangan Sosial Islam (X_1)

Keuangan Sosial Islam dalam penelitian ini merupakan data distribusi atau penyaluran ZIS-DSKL berdasarkan wilayah Provinsi yang dilaporkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dapat diperoleh melalui laman resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BAZNAS RI.

B. Pertumbuhan Ekonomi (X_2)

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Dalam penelitian ini indikator pertumbuhan ekonomi ialah Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga konstan yang dipublikasikan oleh BPS. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah barang yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam sektor perekonomian pada suatu wilayah dengan menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar.

C. Indeks Pembangunan Manusia (Y_1)

Sumber daya yang berkualitas dapat menjadi salah satu penentu berhasilnya suatu Pembangunan wilayah. Salah satu hal yang dapat dilakukan ialah meningkatkan kualitas Pendidikan guna meningkatkan kualitas SDM tersebut. IPM merupakan salah satu indikator yang menggambarkan sejauh mana penduduk dapat menikmati hasil pembangunan dalam aspek pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan faktor-faktor lainnya. BPS mulai menerapkan metode baru IPM pada tahun 2010 mengikuti perubahan metode yang digunakan oleh UNDP pada dimensi pengetahuan, dimensi standar layak hidup serta agregasi. Indikator yang digunakan pada dimensi pengetahuan menjadi Harapan Lama Sekolah (HLS), dimensi standar layak hidup menjadi PNB per kapita, dan agregasi menggunakan rata-rata geometrik pada tahun 2014.

D. Kemiskinan (Y_2)

Penelitian menggunakan persentase penduduk miskin sebagai indikator kemiskinan. Persentase penduduk miskin adalah persentase penduduk yang berada

di bawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin dihitung dengan membagi jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan nasional dengan jumlah penduduk pada periode waktu yang sama, kemudian dinyatakan dalam satuan persen (%).

E. Pengangguran (Y_3)

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka diperoleh dengan cara membagi penduduk yang termasuk dalam kategori pengangguran dengan jumlah angkatan kerja dikali dengan 100 persen. Hal ini dapat menggambarkan efisiensi kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (*supply*) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai TPT, semakin inefisiensi kemampuan ekonomi dalam menyerap persediaan (*supply*) tenaga kerja yang ada. TPT dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi, perubahan siklus bisnis dan teknologi, dan lain-lain.
2. Tingkat Setengah Pengangguran (TSP) adalah persentase penduduk bekerja yang memiliki jam kerja di bawah jam kerja normal dan/atau masih bersedia menerima pekerjaan tambahan. Indikator ini mencerminkan kualitas penyerapan tenaga kerja serta kemampuan perekonomian dalam menyediakan pekerjaan yang produktif dan berkelanjutan. Tingginya TSP menunjukkan bahwa meskipun tenaga kerja telah terserap, namun pemanfaatannya belum optimal, sehingga berpotensi menekan tingkat

pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

F. Pendidikan (Y_4)

Pendidikan adalah salah satu wujud dari pembangunan nasional yang mencerminkan tingkat keberhasilan pembangunan serta pemerataan keadilan. Optimalisasi sektor pendidikan dapat menjadi sarana untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Prioritas pemerintah terhadap sektor pendidikan diwujudkan melalui alokasi minimal 20 persen dari APBN dan APBD, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Kebijakan *mandatory spending* ini mencerminkan komitmen negara dalam membangun sistem pendidikan yang berkualitas guna mencerdaskan kehidupan bangsa

Penelitian menggunakan Angka Partisipasi Murni (APM) sebagai indikator pendidikan. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Data APM dikumpulkan secara tahunan oleh BPS melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). APM dinyatakan dalam bentuk persen.

1. Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar/ sederajat (APM SD)

APM SD adalah proporsi penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah di tingkat SD dibandingkan dengan jumlah penduduk usia yang sama.

2. Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama/ sederajat (APM SMP)

APM SMP adalah proporsi penduduk usia 13–15 tahun yang bersekolah di jenjang SMP dibandingkan dengan total penduduk usia yang sama. Pendidikan NonFormal (Paket B) turut diperhitungkan. Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat

pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2).

3. Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Atas/ sederajat (APM SMA)
Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Atas/ sederajat adalah proporsi penduduk usia 16–18 tahun yang bersekolah di jenjang tersebut terhadap penduduk usia yang sama.

G. Kesehatan (Y_5)

Kesehatan masyarakat dapat menggambarkan berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, dan pendidikan. Kesehatan masyarakat dapat mendorong produktifitas dan menggambarkan kelayakan hidup masyarakat. Puskesmas dan klinik adalah titik awal masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan atau merupakan bagian dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Keberadaannya merefleksikan sejauh mana akses dasar terhadap layanan kesehatan tersedia. FKTP berperan dalam pengobatan penyakit, tetapi juga mengutamakan upaya promotif dan preventif, sehingga masyarakat dapat menjaga dan meningkatkan kesehatannya sebelum penyakit menjadi lebih serius. Dalam penelitian ini indikator kesehatan ialah jumlah puskesmas dan klinik.

1. Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat).

Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

2. Klinik.

Klinik merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan

pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medik dasar dan/atau spesialistik secara komprehensif. Dalam penelitian ini klinik terdiri atas jumlah klinik pratama dan jumlah klinik utama. Klinik Pratama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar. Klinik Utama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik atau pelayanan medik dasar dan spesialis.

H. Kesejahteraan Sosial (Y_6)

Kesejahteraan sosial dapat ditingkatkan melalui pelayanan kesehatan dan bantuan sosial yang tepat sasaran. Pelayanan kesehatan yang baik, seperti akses ke fasilitas kesehatan dan pemeriksaan rutin, dapat meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat. Bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dapat membantu keluarga mengurangi beban ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Dalam penelitian ini indikator kesejahteraan sosial ialah PBI-JKN dan KPMBSP.

1. KPMBSP (Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Pangan)

Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan Direktur Jenderal. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Bantuan Pangan Nontunai yang selanjutnya disingkat BNPT adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-

warong.

2. PBI-JKN (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional)

PBI-JKN adalah program pemerintah yang membiayai iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu. Jaminan kesehatan merupakan bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rumah tangga agar bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak sehingga jaminan kesehatan ini menjadi kebutuhan penting bagi setiap rumah tangga. Dalam RPJMN 2020-2024 salah satu sasaran Program Pelayanan Kesehatan dan JKN adalah tercapainya jumlah peserta PBI-JKN sebanyak 112,9 juta jiwa. PBI-JKN yang digunakan pada penelitian ini merupakan persentase PBI-JKN terhadap jumlah penduduk.

3.5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan metode analisis *Struktural Equation Modeling* dengan jenis *Partial Least Square (PLS-SEM)* dan di olah dengan menggunakan *software Smart PLS versi 4.1.0.8*. Statistik deskriptif merupakan proses transformasi data pada penelitian untuk mempermudah dalam memahami dan diinterpretasikan penelitian tersebut biasanya dilakukan dengan menghitung (rata-rata), median, modus, mencari deviasi standar dan melihat kemencengan distribusi data dan sebagainya (Wahyuni, 2020).

Structural Equation Model (SEM) merupakan teknik statistik multivariat yang mengintegrasikan analisis faktor dengan analisis regresi (atau korelasi). Metode ini digunakan untuk menguji hubungan antar variabel dalam sebuah model, baik hubungan antara indikator dengan konstraknya maupun antar konstruk itu

sendiri (Ginting, 2009).

Dalam mengembangkan SEM terdapat beberapa macam metode yang dapat diterapkan, diantaranya ialah *partial least square (PLS)*. *Partial Least Square* merupakan sebuah persamaan struktural berbasis varian secara simultan bisa melakukan pengujian model pengukuran (*measurement model*) bersamaan dengan pengujian model struktural (*structural model*).

Dalam model pengukuran (*measurement model*) digambarkan bagaimana variabel manifest (indikator-indikator) atau *observed variable* mempersentasi variabel laten untuk diukur. Sedangkan pada model struktural (*structural model*) menggambarkan kekuatan estimasi antar variabel laten atau konstruk (Ghozali dan Latan, 2015). Dalam penelitian ini alasan penggunaan *PLS* sebagai metode analisis data ialah jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian dapat berupa sampel dengan ukuran kurang dari 100 atau tidak harus besar, *PLS* juga dapat digunakan untuk menguji teori yang lemah maupun untuk menkonfirmasi teori (Ghozali, 2014).

Dalam *PLS-SEM* indikator atau variabel manifest dari variabel laten yang dibentuk dapat berupa refleksif maupun formatif. Penelitian ini menggunakan indikator yang bersifat refleksif dan formatif. Berikut disajikan persamaan model struktural dan persamaan pengukuran yang digunakan dalam model penelitian.

1. Persamaan *Outer Model*

A. Variabel Endogen 1 (Reflektif): IPM (η_1)

$$y_1 = \lambda_1 \eta_1 + \varepsilon_1 \quad (2)$$

B. Variabel Endogen 2 (Reflektif): Kemiskinan (η_2)

$$y_2 = \lambda_2 \eta_2 + \varepsilon_2 \quad (3)$$

C. Variabel Endogen 3 (Reflektif): Pengangguran (η_3)

$$y_3 = \lambda_3 \eta_3 + \varepsilon_3 \quad (4)$$

$$y_4 = \lambda_4 \eta_4 + \varepsilon_4 \quad (5)$$

D. Variabel Endogen 4 (Formatif): Pendidikan (η_4)

$$\eta_4 = \lambda_5 y_5 + \lambda_6 y_6 + \lambda_7 y_7 \quad (6)$$

E. Variabel Endogen 5 (Reflektif): Kesehatan (η_5)

$$y_8 = \lambda_8 \eta_5 + \varepsilon_8 \quad (9)$$

$$Y_9 = \lambda_9 \eta_5 + \varepsilon_9 \quad (10)$$

F. Variabel Endogen 6 (Formatif): Kesejahteraan Sosial (η_6)

$$\eta_6 = \lambda_{10} y_{10} + \lambda_{11} y_{11} \quad (11)$$

G. Variabel Eksogen 1 (Reflektif): KSI (ξ_1)

$$x_1 = \lambda_1 \xi_1 + \delta_1 \quad (12)$$

H. Variabel Eksogen 2 (Reflektif): Pertumbuhan Ekonomi (ξ_2)

$$x_2 = \lambda_2 \xi_2 + \delta_2 \quad (13)$$

2. Persamaan *Inner Model*

Persamaan untuk *inner model* dapat ditulis sebagai berikut:

$$\eta_1 = \gamma_{11} \xi_1 + \gamma_{12} \xi_2 + \zeta_1 \quad (14)$$

$$\eta_2 = \gamma_{21} \xi_1 + \gamma_{22} \xi_2 + \beta_{21} \eta_1 + \zeta_2 \quad (15)$$

$$\eta_3 = \gamma_{31} \xi_1 + \gamma_{32} \xi_2 + \zeta_3 \quad (16)$$

$$\eta_4 = \gamma_{41} \xi_1 + \gamma_{42} \xi_2 + \beta_{41} \eta_1 + \zeta_4 \quad (17)$$

$$\eta_5 = \gamma_{51} \xi_1 + \gamma_{52} \xi_2 + \zeta_5 \quad (18)$$

$$\eta_6 = \gamma_{61}\xi_1 + \gamma_{62}\xi_2 + \zeta_6 \quad (19)$$

Keterangan:

λ = Faktor Loading

ε, δ = Residual diantara variabel laten dan indikatornya

ξ = Variabel Eksogen laten

η = Variabel Endogen Laten

γ = *Path Coefficient* antara variabel eksogen laten dan variabel endogen laten

β = *Path Coefficient* antara variabel endogen laten dan variabel endogen laten

ζ = Model Residual

y_1 = Indeks Pembangunan Manusia

y_2 = persentase penduduk miskin

y_3 = Tingkat Pengangguran Terbuka

y_4 = Tingkat Setengah Pengangguran

y_5 = Angka Partisipasi Murni SD

y_6 = Angka Partisipasi Murni SMP

y_7 = Angka Partisipasi Murni SMA

y_8 = Jumlah Puskesmas

y_9 = Jumlah Klinik

y_{10} = KPMBS

y_{11} = Persentase PBIJKN

x_1 = Distribusi Keuangan Sosial Islam

x_2 = Produk Domestik Regional Bruto

3.6. Tahapan Analisis Data

Menurut Ghozali dan Lartan (2015) pada analisis menggunakan *PLS-SEM* terdapat setidaknya melalui lima (5) proses tahapan yang harus dilalui dimana setiap tahapannya akan memberikan pengaruh terhadap tahapan berikutnya, tahapan-tahapan tersebut yakni (1) konseptualisasi model, (2) menentukan metode analisis algorithm, (3) menentukan metode resampling, (4) menggambar diagram jalur dan (5) evaluasi model.

1. Konseptualisasi Model

Pada tahap ini peneliti melakukan pengembangan dan pengukuran konstruk. Menurut Churchill (1979) tahapan ini terdiri dari spesifikasi domain konstruk, menentukan item pertanyaan yang merepresentasi konstruk, pengumpulan data, purifikasi konstruk, pengumpulan data baru, uji reliabilitas, uji validitas dan menentukan skor pengukuran konstruk.

2. Menentukan Metode Analisis *Algorithm*

Model yang telah melalui tahapan konseptualisasi model selanjutnya harus menentukan metode analisis *algorithm* yang akan digunakan pada estimasi model, terdapat 3 pilihan skema yaitu *factorial*, *centroid* dan *path* atau struktural *weighting*. Kemudian dilanjutkan dengan menentukan jumlah sampel yang akan digunakan atau yang harus dipenuhi. *PLS-SEM* tidak menuntut jumlah sampel yang besar, minimal direkomendasikan antara 30 sampai dengan 100.

3. Menentukan Metode Resampling

Secara umum terdapat dua metode yang digunakan oleh peneliti di bidang SEM pada proses resampling yaitu *bootstrapping* dan *jackknifing*. Menurut

Mosteller dan Tukey (1977) metode *jackknifing* hanya menggunakan subsample dari sampel asli yang dikelompokkan dalam grup untuk melakukan *resampling* kembali. Sedangkan metode *bootstrapping* seluruh sampel asli untuk melakukan *resampling* Kembali. Pada program *SmartPLS* 4.1.0.8 hanya disediakan satu metode *resampling* yakni *bootstrapping*.

4. Menggunakan Diagram Jalur

Dalam menggambarkan diagram jalur Falk dan Miller (1992) memberi rekomendasi untuk menggunakan prosedur nomogram reticular action modelling (RAM) dengan beberapa ketentuan sebagai berikut; (a) konstruk teoritikal yang menunjukkan variabel laten harus digambara dengan bentuk lingkaran atau bulatan elips, (b) *variabel observed* atau indikator harus Digambar dengan bentuk kotak, (c) hubungan-hubungan asimetri digambarkan dengan arah panah tunggal, (d) hubungan-hubungan simetris digambarkan dengan arah panah *double*.

5. Evaluasi Model

Pada Program *SmartPLS* 4.1.0.8 evaluasi model dapat dilakukan dengan menilai hasil pengukuran model (*measurement model*) yakni melalui analisis faktor konfirmatori atau *confirmatory factor analysis (CFA)* dengan menguji validitas dan reabilitas konstruk laten. Kemudian akan dilanjutkan dengan evaluasi model struktural dan pengujian siginifikansi atau menguji pengaruh antar konstruk atau variabel.

BAB IV

DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Statistik Deskriptif

Berikut merupakan hasil olah data statistik deskriptif yang ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Varia bel	Indikator	Mean	Min	Max	Std. Dev.	Skewne ss	Excess kurtosi s
KSI	DKSI	173,38	0,22	2241	368	11,94	3,42
PE	PDRB	375,028, 53	26.60 0	2,050,47 0	495,414, 35	3,19	2,07
IPM	IPM	72,05	60	82,5	3,85	1,85	-0,05
POV	POV	9,92	3,5	27,5	5,13	2,20	1,42
UNE	TPT	4,94	1,2	10,1	1,6	0,35	0,72
	TSP	8,06	1,89	16,83	2,8	0,29	0,4
PDK	APM SD	97,36	79,2	99,6	3,48	17,58	-4,08
	APM SMP	78,87	57,2	88,2	5,99	2,69	-1,35
	APM SMA	62,82	44,3	76,4	6,25	0,58	-0,29
KSH	PKS	313,23	64	1100	251,68	2,73	1,87
	Klinik	452,54	9	3951	712,99	10,83	3,15
KS	KPMBSP	10,13	0,02	69	10,7	6,71	2,08
	PBIJKN	50,70	24,7	87	12,43	0,39	0,5

Sumber: Output *Smartpls* diolah kembali

Analisis statistik deskriptif merupakan analisis yang memberikan deskripsi mengenai data yang telah terkumpul melalui nilai dari rata-rata (*mean*), maksimum, minimum, dan standar deviasi dari masing-masing variabel (Sugiyono, 2007).

4.2. Analisis Data Kuantitatif

Regresi parsial yang diterapkan dalam *PLS-SEM* dilakukan secara iteratif dalam dua tahap. Tahap pertama menilai skor konstruk atau evaluasi model pengukuran, sedangkan tahap kedua mengestimasi outer loading, koefisien jalur, dan nilai R-kuadrat atau evaluasi model struktural.

4.2.1. Evaluasi Model Pengukuran (outer model)

Evaluasi model pengukuran menjelaskan bagaimana hubungan indikator dengan variabel latennya melalui dua uji yaitu uji reliabilitas dan uji validitas konstruk. Dalam penelitian ini hubungan tersebut dalam bentuk model reflektif dan formatif.

4.2.1.1 Uji Reliabilitas (Konsistensi Internal) dan Validitas Model Pengukuran Reflektif

Konstruk dengan indikator reflektif mengasumsikan bahwa kovarians antarindikator dalam model pengukuran dijelaskan oleh variasi yang berasal dari konstruk laten yang diwakilinya. Arah hubungan kausalitas berjalan dari konstruk laten menuju indikator, sehingga indikator dipandang sebagai representasi dari konstruk tersebut. Uji validitas indikator reflektif dilakukan melalui tiga tahap yaitu validitas konvergen, validitas diskriminan dan reliabilitas (konsistensi internal).

1. Validitas Konvergen (*Convergent validity*)

Validitas konvergen didasarkan pada prinsip bahwa indikator (variabel manifest) yang merefleksikan suatu konstruk seharusnya memiliki tingkat korelasi yang tinggi. Indikator dianggap memenuhi validitas konvergen apabila nilai *outer loading* (λ) > 0.70 dan nilai *AVE* (*Average Variance Extracted*) > 0.50. Tabel 4.2,

menunjukkan hasil *outer loading* atau estimasi awal uji validitas. Berdasarkan hasil pengujian validitas konvergen terdapat satu indikator, yaitu y_4 dengan nilai *outer loading* sebesar $-0,631 < 0,70$. Hal ini menunjukkan indikator tidak valid sehingga dilakukan eliminasi terhadap indikator TSP. Eliminasi dilakukan dengan tujuan meningkatkan reabilitas serta validitas model pengukuran (Hair, Joseph dkk., 2019; Hair dkk., 2017; Hulland, 1999).

Tabel 3.2 Hasil *outer loading*

Variabel	Indikator	<i>Outer Loading</i>
KSI	DKSI	1,000
PE	PDRB	1,000
IPM	IPM	1,000
POV	POV	1,000
UNE	TPT	0,875
	TSP	-0,631
KSH	PKS	0,954
	Klinik	0,950

Sumber: Output *Smartpls* diolah kembali

Tabel 4.3 Hasil *Outer Loading* Setelah Eliminasi

Variabel	Indikator	<i>Outer Loading</i>
KSI	DKSI	1,000
PE	PDRB	1,000
IPM	IPM	1,000
POV	POV	1,000
UNE	TPT	0,875
KSH	PKS	0,954
	Klinik	0,950

Sumber: Output *Smartpls* diolah kembali

Berdasarkan Tabel 4.3, dapat dilihat seluruh indikator setelah dilakukann

eliminasi, sehingga telah memenuhi uji validitas konvergensi dengan nilai *outer loading* masing-masing indikator > 0.70. atau konstruk- konstruk variabel laten dinyatakan valid.

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas (AVE)

Variabel	AVE	Keterangan
KSH (<i>Y₅</i>)	0,906	Validitas Konvergen Baik

Sumber: Output *Smartpls* diolah kembali

Berdasarkan hasil pada tabel 4.4, dapat dilihat bahwa konstruk secara rata-rata memiliki kemampuan menjelaskan lebih dari separuh varians dari indikator-indikator pembentuknya. Dengan demikian, seluruh konstruk variabel laten dalam model penelitian dinyatakan valid secara konvergen.

2. Validitas Diskriminan (*Discriminant Validity*)

Validitas diskriminan didasarkan pada prinsip bahwa indikator suatu konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi dengan tinggi. *Loading* sebuah indikator pada konstruk yang diukur seharusnya lebih besar daripada *loading* terhadap konstruk lain (*cross-loadings*). Berikut merupakan hasil nilai *cross-loadings* yang diperoleh:

Tabel 4.5 Hasil *Discriminant Validity* - *Cross Loadings*

	KSI	PE	IPM	POV	UNE	KSH
DKSI	1,000	0,839	0,400	-0,204	0,461	0,649
PDRB	0,839	1,000	0,382	-0,211	0,411	0,814
IPM	0,400	0,382	1,000	-0,646	0,312	0,124
POV	-0,204	-0,211	-0,646	1,000	-0,276	-0,069
TPT	0,461	0,411	0,312	-0,276	1,000	0,396
PKS	0,721	0,804	0,250	-0,171	0,492	0,954
Klinik	0,510	0,744	-0,021	0,046	0,256	0,950

Sumber: Output *Smartpls* diolah kembali

Berdasarkan Tabel 4.5, menunjukkan bahwa setiap indikator pada konstruk

memiliki nilai *loading* lebih besar terhadap konstruk yang diukur dibandingkan dengan *loading* terhadap konstruk lain. Sehingga dapat disimpulkan setiap indikator-indikator dalam penelitian ini telah memenuhi uji validitas diskriminan atau dinyatakan valid.

3. Reliabilitas (Konsistensi Internal)

Uji reliabilitas konsistensi internal mengukur sejauh mana indikator-indikator yang merefleksikan suatu konstruk memberikan hasil yang konsisten. Berdasarkan hasil Tabel 4.6, menunjukkan bahwa indikator-indikator pada variabel kesehatan memiliki tingkat konsistensi internal yang baik, karena nilai dari masing-masing ukuran $> 0,70$. Dengan demikian, seluruh indikator yang digunakan pada variabel kesehatan dapat dinyatakan andal dan konsisten dalam mengukur konstruk yang sama.

Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Crobach's alpha	Composite Reliability	Keterangan
Y ₅ (KSH)	0,896	0.951	Reliabilitas Internal Baik

Sumber: Output *Smartpls* diolah kembali

4.2.1.4 Uji Reliabilitas (Konsistensi Internal) dan Validitas Model Pengukuran Formatif

Konstruk dengan indikator formatif mengasumsikan bebas dari kesalahan pengukuran. Indikator formatif arah panah menunjuk dari variabel indikator ke konstruk atau menggambarkan hubungan kausal. Evaluasi model pengukuran formatif meliputi signifikansi dan relevansi bobot luar (*outer weight*) indikator, pemuatan luar (*outer loading*), serta kolineritas indikator.

Tabel 4.7 Hasil Analisis *Outer Weight* dan *Outer Loading*

Variabel	Indikator	Weight	t-value	loading	t-value
PDK	APMSD	0,272	0,693	0,909***	6,117
	APMSMP	0,533*	1,766	0,902***	8,833
	APMSMA	0,338**	2,998	0,802***	7,166
KS	KPMBSP	0,823	1,092	0,697	1,101
	PBIJKN	-0,728	1,011	-0,585	0,986

*p < 0.10; **p < 0.05; *** p < 0.01

Sumber: Output *Smartpls* diolah kembali

Berdasarkan tabel 4.7, dapat dilihat bahwa indikator-indikator variabel PDK telah memenuhi validitas konvergen yaitu memiliki bobot yang signifikan dan nilai *outer loading* > 0,5. Sedangkan pada variabel KS indikator yang memenuhi validitas konvergen hanya indikator KPMBSP. Indikator PBIJKN tidak signifikan dan *outer loading* < 0.5 maka indikator harus dihilangkan dari model, akan tetapi jika indikator PBIJKN dihilangkan dan indikator KPMBSP berubah menjadi *single-construct*, indikator dianggap tidak cukup mewakili nilai KS sehingga variabel KS dihilangkan dari model (Hair, Joseph dkk., 2019).

4.2.2. Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Evaluasi model struktural menilai keakuratan hubungan kausalitas antar variabel laten dalam model. Evaluasi dilakukan melalui multikolinieritas, nilai *R-Square* (kelayakan model), Q^2 (relevansi prediktif), dan *t-statistics* dan *p-value* (signifikansi jalur).

1. Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilihat dengan nilai VIF (*variance inflation factors*). Nilai VIF pada seluruh indikator tidak boleh > 3. Hasil uji multikolinieritas, dapat dilihat pada lampiran olah data *smartpls* halaman 108 menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki nilai VIF <3, yang mengindikasikan tidak adanya masalah

multikolinieritas dalam model penelitian.

2. *R-square* (R^2) / Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa besar variabel eksogen menjelaskan variabel endogen. Berdasarkan Chin (1998) nilai R^2 dianggap baik dengan tiga kriteria berikut, kriteria lemah (0,19), moderat (0,33), dan kuat (0,67). Akan tetapi berdasarkan Falk & Miller (1992) serta Raithel, dkk. (2012) nilai $R^2 > 0,1$ model dianggap baik dan dapat diterima. Tabel 4.8, menunjukkan hasil uji *R-squares* seluruh variabel telah memenuhi kategori. Hal ini menandakan model struktural memiliki kemampuan penjelasan yang baik terhadap variabel dependen.

Tabel 4.8 Hasil Uji *R-Squares*

Variabel	<i>R-square</i>	<i>R-square adjusted</i>
IPM	0,167	0,156
POV	0,422	0,410
UNE	0,214	0,204
PDK	0,590	0,581
KSH	0,667	0,662

Sumber: Output *Smartpls* diolah kembali

3. Q^2 (*Predictive Relevance*)

Nilai Q^2 atau *Q-square* mengukur kemampuan model dalam memprediksi data observasi pada konstruk endogen. Nilai $Q^2 > 0$ menandakan model memiliki relevansi prediktif, sedangkan $Q^2 < 0$ menunjukkan model kurang memiliki relevansi prediktif (Ghozali, 2021). Berdasarkan tabel 4.9, diperoleh nilai $Q^2 > 0$ pada seluruh variabel endogen hal ini menunjukkan model memiliki *predictive relevance* yang baik untuk memprediksi konstruk endogen dalam penelitian.

Tabel 4.9 Nilai Q^2 (Predictive Relevance)

Variabel	SSO	SSE	Q^2 (=1-SSE/SSO)
IPM	150	126,562	0,156
POV	150	88,526	0,410
UNE	150	119,453	0,204
PDK	450	251,969	0,440
KSH	300	120,550	0,598

Sumber: Output *Smartpls* diolah kembali

4.2.2.5 Jalur Model (Path Coefficient)

Koefisien jalur pada model struktural menjelaskan besarnya pengaruh konstruk eksogen terhadap konstruk endogen. Estimasi diperoleh melalui prosedur *bootstrapping* dengan 5000 sampel ulang acak dan interval kepercayaan 95%. Pengujian signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai t-statistik dan p-value. Kriteria pengujian menyatakan bahwa apabila nilai t-statistik > t-tabel atau p-value berada di bawah tingkat signifikansi yang ditetapkan. Dalam penelitian ini, hubungan antar konstruk diuji dengan tingkat signifikansi 1% ($p < 0,01$), 5% ($p < 0,05$), dan 10% ($p < 0,10$).

Tabel 4.10 Path Coefficient

		Original sample	t-statistics	p-values
H_1	DKSI -> IPM	0,269	2,167	0,030
H_2	DKSI → POV	0,089	1,269	0,204
H_3	DKSI → UNE	0,394	2,938	0,003
H_4	DKSI -> PDK	-0,223	1,908	0,057
H_5	DKSI -> KSH	-0,116	0,526	0,599
H_6	DKSI -> KS	-	-	-
H_7	PE -> IPM	0,157	1,546	0,122
H_8	PE -> POV	-0,029	0,366	0,714
H_9	PE -> UNE	0,080	0,600	0,549
H_{10}	PE -> PDK	-0,063	0,330	0,741
H_{11}	PE -> KSH	0,911	5,599	0,000
H_{12}	PE -> KS	-	-	-

Sumber: Output *Smartpls* diolah kembali

Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil uji koefisien jalur sebagai berikut:

1. Hipotesis 1 menyatakan bahwa KSI berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Hasil pengujian menunjukkan bahwa DKSI berpengaruh signifikan terhadap IPM, dengan nilai *t-statistic* sebesar 2,167 ($>1,96$) dan *p-value* sebesar 0,030 ($< 0,10$). Selain itu, arah koefisien jalur menunjukkan nilai positif ($\beta = 0,269$) atau sejalan dengan arah yang dihipotesiskan. Dengan demikian, hipotesis 1 diterima.
2. Hipotesis 2 menyatakan bahwa KSI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap POV. Hasil pengujian menunjukkan bahwa KSI tidak berpengaruh signifikan terhadap POV, dengan nilai *t-statistic* sebesar 1,269 ($<1,96$) dan *p-value* sebesar 0,204 ($> 0,10$). Selain itu, arah koefisien jalur menunjukkan nilai positif ($\beta = 0,089$) atau tidak sejalan dengan arah yang dihipotesiskan. Dengan demikian, hipotesis 2 ditolak.
3. Hipotesis 3 menyatakan bahwa KSI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap UNE. Hasil pengujian menunjukkan bahwa KSI berpengaruh signifikan terhadap UNE, dengan nilai *t-statistic* sebesar 2,938 ($>1,96$) dan *p-value* sebesar 0,003 ($< 0,10$). Namun, arah koefisien jalur menunjukkan nilai positif ($\beta = 0,394$) atau tidak sejalan dengan arah yang dihipotesiskan. Dengan demikian, hipotesis 3 ditolak.
4. Hipotesis 4 menyatakan bahwa KSI berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDK. Hasil pengujian menunjukkan bahwa KSI berpengaruh signifikan terhadap PDK, dengan nilai *t-statistic* sebesar 1,908 dan *p-value*

sebesar 0,057 ($< 0,10$). Namun, arah koefisien jalur menunjukkan nilai negatif ($\beta = -0,223$) atau tidak sejalan dengan arah yang dihipotesiskan. Dengan demikian, hipotesis 4 ditolak.

5. Hipotesis 5 menyatakan bahwa KSI berpengaruh positif dan signifikan terhadap KSH. Hasil pengujian menunjukkan bahwa KSI berpengaruh signifikan terhadap KSH, dengan nilai *t-statistic* sebesar 0,526 dan *p-value* sebesar 0,599 ($> 0,10$). Selain itu, arah koefisien jalur menunjukkan nilai negatif ($\beta = -0,116$) atau tidak sejalan dengan arah yang dihipotesiskan. Dengan demikian, hipotesis 5 ditolak.
6. Hipotesis 6 menyatakan bahwa KSI berpengaruh positif dan signifikan terhadap KS. Namun, konstruk KS tidak memenuhi kriteria validitas pada tahap pengujian model pengukuran, sehingga tidak dapat diikutsertakan dalam model struktural. Dengan demikian, hipotesis 6 tidak dapat diuji dan dinyatakan tidak didukung secara empiris.
7. Hipotesis 7 menyatakan bahwa PE berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Hasil pengujian menunjukkan bahwa PE berpengaruh signifikan terhadap IPM, dengan nilai *t-statistic* sebesar 1,546 ($< 1,96$) dan *p-value* sebesar 0,122 ($> 0,10$). Kemudian arah koefisien jalur menunjukkan nilai positif ($\beta = 0,157$) atau sejalan dengan arah yang dihipotesiskan akan tetapi secara statistik tidak cukup kuat. Dengan demikian, hipotesis 7 ditolak.

8. Hipotesis 8 menyatakan bahwa PE berpengaruh negatif dan signifikan terhadap POV. Hasil pengujian menunjukkan bahwa PE tidak berpengaruh signifikan terhadap POV, dengan nilai *t-statistic* sebesar 0,366 (<1,96) dan *p-value* sebesar 0,714 (> 0,10). Namun, arah koefisien jalur menunjukkan nilai negatif ($\beta = -0,029$) atau sejalan dengan arah yang dihipotesiskan akan tetapi secara statistik tidak cukup kuat. Dengan demikian, hipotesis 8 ditolak.
9. Hipotesis 9 menyatakan bahwa PE berpengaruh negatif dan signifikan terhadap UNE. Hasil pengujian menunjukkan bahwa PE tidak berpengaruh signifikan terhadap UNE, dengan nilai *t-statistic* sebesar 0,600 (<1,96) dan *p-value* sebesar 0,549 (> 0,10). Kemudian arah koefisien jalur menunjukkan nilai negatif ($\beta = 0,080$) atau sejalan dengan arah yang dihipotesiskan. Dengan demikian, hipotesis 9 diterima.
10. Hipotesis 10 menyatakan bahwa PE berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDK. Hasil pengujian menunjukkan bahwa PE tidak berpengaruh signifikan terhadap PDK, dengan nilai *t-statistic* sebesar 0,330 (<1,96) dan *p-value* sebesar 0,741 (> 0,10). Namun, arah koefisien jalur menunjukkan nilai negatif ($\beta = -0,063$) atau tidak sejalan dengan arah yang dihipotesiskan. Dengan demikian, hipotesis 10 ditolak.
11. Hipotesis 11 menyatakan bahwa PE berpengaruh positif dan signifikan terhadap KSH. Hasil pengujian menunjukkan bahwa PE berpengaruh signifikan terhadap KSH, dengan nilai *t-statistic* sebesar 5,599 (>1,96) dan

p-value sebesar 0,000 ($< 0,10$). Kemudian, arah koefisien jalur menunjukkan nilai positif ($\beta = 0,911$) atau sejalan dengan arah yang dihipotesiskan. Dengan demikian, hipotesis 11 diterima.

12. Hipotesis 12 menyatakan bahwa PE berpengaruh positif dan signifikan terhadap KS. Namun, konstruk KS tidak memenuhi kriteria validitas pada tahap pengujian model pengukuran, sehingga tidak dapat diikutsertakan dalam model struktural. Dengan demikian, hipotesis 12 tidak dapat diuji dan dinyatakan tidak didukung secara empiris.

Tabel 4.11 Pengaruh Spesifik Tidak Langsung

		<i>Original sample</i>	<i>t-statistics</i>	<i>p-values</i>
<i>H₁₃</i>	KSI -> IPM -> POV	-0,180	2,062	0,039
<i>H₁₄</i>	KSI -> IPM-> PDK	0,225	2,103	0,035
<i>H₁₅</i>	PE -> IPM -> POV	-0,105	1,442	0,149
<i>H₁₆</i>	PE -> IPM -> PDK	0,131	1.545	0.123

Sumber: Output *Smartpls* diolah kembali

13. Hipotesis 13 menyatakan bahwa KSI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap POV melalui IPM. Hasil pengujian menunjukkan bahwa KSI berpengaruh signifikan terhadap POV, dengan nilai *t-statistic* sebesar 2,062 ($>1,96$) dan *p-value* sebesar 0,039 ($< 0,10$). Kemudian arah koefisien jalur menunjukkan nilai negatif ($\beta = -0,180$) atau sejalan dengan arah yang dihipotesiskan. Dengan demikian, hipotesis 13 diterima.

14. Hipotesis 14 menyatakan bahwa KSI berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDK melalui IPM. Hasil pengujian menunjukkan bahwa KSI berpengaruh signifikan terhadap PDK, dengan nilai *t-statistic* sebesar 2,103

(>1,96) dan *p-value* sebesar 0,035 (< 0,10). Kemudian arah koefisien jalur menunjukkan nilai positif ($\beta = 0,025$) atau sejalan dengan arah yang dihipotesiskan. Dengan demikian, hipotesis 14 diterima.

15. Hipotesis 15 menyatakan bahwa PE berpengaruh negatif dan signifikan terhadap POV melalui IPM. Hasil pengujian menunjukkan bahwa PE tidak berpengaruh signifikan terhadap POV, dengan nilai *t-statistic* sebesar 1,442 (<1,96) dan *p-value* sebesar 0,149 (> 0,10). Kemudian arah koefisien jalur menunjukkan nilai negatif ($\beta = -0,105$) atau sejalan dengan arah yang dihipotesiskan akan tetapi secara statistik tidak cukup kuat. Dengan demikian, hipotesis 15 ditolak.

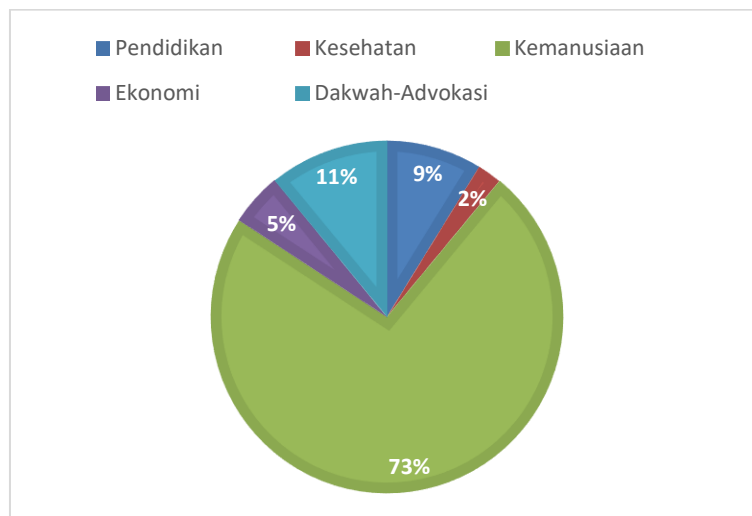
16. Hipotesis 16 menyatakan bahwa PE berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDK melalui IPM. Hasil pengujian menunjukkan bahwa PE tidak berpengaruh signifikan terhadap PDK, dengan nilai *t-statistic* sebesar 1,545 (<1,96) dan *p-value* sebesar 0,123 (>0,10). Kemudian arah koefisien jalur menunjukkan nilai positif ($\beta = 0.131$) atau sejalan dengan arah yang dihipotesiskan akan tetapi secara statistik tidak cukup kuat. Dengan demikian, hipotesis 16 ditolak.

4.2.2.6. Analisis Interpretasi Hasil

4.2.2.6.1. Pengaruh DKSI terhadap IPM

Hasil estimasi model struktural menunjukkan bahwa distribusi keuangan sosial Islam berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Nilai koefisien jalur yang positif mengindikasikan bahwa distribusi dana

KSI yang dilakukan oleh BAZNAS memiliki kontribusi substantif dalam meningkatkan kualitas masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tawakkal, dkk. (2023), Hamid & Jamaluddin (2023) Siswantoro & Ikhwan (2024) dan Anindya & Pimada (2023) yang melaporkan dampak jangka panjang zakat terhadap dimensi pembangunan manusia.



Sumber Data: BAZNAS diolah kembali

Gambar 4.1 Persentase DKS per bidang program BAZNAS 2019-2023

Pada gambar 4.1, dapat dilihat bahwa pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan merupakan tiga diantara lima sektor utama distribusi dana KSI oleh BASNAZ. Sektor-sektor tersebut secara garis besar berkaitan dengan dimensi-dimensi indeks pembangunan manusia yaitu pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak. Meskipun data pertumbuhan mustahik berdasarkan lima sektor utama secara rinci baru tersedia sejak tahun 2022, pola penyaluran dana KSI pada periode tersebut menunjukkan konsistensi dengan arah penelitian. Berdasarkan tabel 4.12, dapat dilihat bahwa terjadi pertumbuhan pada sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan dimensi IPM, seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Tabel 4.12 Jumlah Mustahik berdasarkan Per Bidang Program BAZNAS

Tahun	2022	2023	Pertumbuhan
Kemanusiaan	11.217.420	20.281.180	0,81
Kesehatan	13.88.367	9.492.945	5,84
Pendidikan	1.490.401	5.350.023	2,59
Ekonomi	746.959	2.802.895	2,75
Dakwah/Advokasi	10.964.278	20.544.479	0,87

Sumber Data: BAZNAS diolah kembali

Hal ini juga didukung oleh penelitian Rusanti, dkk. (2023) yang memperoleh hasil bahwa distribusi dana zakat pada sektor pendidikan dan kemanusiaan berpengaruh signifikan dalam meningkatkan IPM melalui peningkatan kualitas pendidikan dan standar layak hidup. BAZNAS melalui program pendidikan dan dakwah berpotensi dalam meningkatkan RLS (Rata-rata Lama Sekolah) dan HLS (Harapan Lama Sekolah) dengan menyediakan bantuan dana pendidikan dengan jenjang pendidikan sekolah dasar hingga strata 1 (S-1). Sementara itu, distribusi pada sektor kemanusiaan berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan dasar seperti bantuan logistik berupa sembako, makanan, uang tunai hingga tempat tinggal.

Temuan penelitian ini berbeda dengan temuan Hasbi (2023). Hasbi (2023) tidak hanya menggunakan IPM sebagai indikator utama tetapi juga Indeks Pembanguna Manusia Islami (IPMI/I-HDI), dimana diperoleh hasil estimasi bahwa zakat tidak berpengaruh terhadap IPM dan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel IPMI. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun zakat berpotensi meningkatkan kesejahteraan individu, mekanisme distribusinya belum mampu mendorong peningkatan pembangunan manusia yang inklusif dan

berkeadilan. Perbedaan hasil ini dapat dijelaskan oleh perbedaan indikator pembangunan manusia yang digunakan, kerangka teoretis Maqasid al-Syariah, serta pendekatan metodologis yang menekankan dinamika jangka panjang melalui regresi panel dinamis (*GMM*), berbeda dengan pendekatan *PLS-SEM* dalam penelitian ini.

4.2.2.6.2. Pengaruh DKSI terhadap kemiskinan

Hasil estimasi model struktural menunjukkan bahwa variabel distribusi keuangan sosial Islam tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kemiskinan. Nilai koefisien jalur yang positif mengindikasikan bahwa peningkatan distribusi keuangan sosial Islam diikuti oleh peningkatan kemiskinan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hamad (2023), Anindya & Pimada (2023), dan Hamid & Jamaluddin (2023) di mana ditemukan bahwa distribusi dana zakat berpengaruh terhadap perekonomian mustahik melalui pendapatan dan usaha para mustahik tetapi tidak berpengaruh langsung terhadap pengurangan kemiskinan. Dana distribusi zakat sejauh ini lebih bersifat konsumtif sehingga belum berhasil membuat para mustahik keluar dari kemiskinan. Penelitian Asya'bani, dkk. (2025) menemukan bahwa penyaluran dana zakat mempengaruhi perilaku konsumtif mustahik dimana hal ini menandakan penggunaan dana ZIS yang lebih berorientasi pada konsumsi.

Gambar 4.1, menunjukkan bahwa distribusi dana KSI didominasi pada bidang kemanusiaan yaitu sekitar 73% dimana tujuan dari program ialah terpenuhinya kebutuhan dasar mustahik, sedangkan pada bidang ekonomi yang bertujuan mengatasi kemiskinan melalui pemberian modal usaha, pendampingan

serta pengawasan dengan tujuan agar mustahik dapat mencapai kemandirian ekonomi masih kecil dibandingkan dengan program lainnya atau hanya sekitar 5% dari total distribusi dan KSI. Penelitian lebih lanjut mengenai KSI dalam pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan oleh Purbasari, dkk. (2020) dengan menggunakan teknik *Basic Needs Deficiency Index* (BNDI) memperoleh bahwa KSI (dana ZIS) yang didistribusikan oleh BAZNAS kepada masyarakat di setiap provinsi belum bisa memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Minimnya dana ZIS yang diterima tidak sebanding dengan pengeluaran masyarakat untuk kebutuhan pokok.

Tabel 4.13 Potensi dan realisasi penerimaan KSI 2019-2022 (Miliar Rupiah)

Tahun	Potensi	Realisasi	%
2019	233,8	10,3	4,4
2020	327	12,5	3,8
2022	327	21,3	6,5

Sumber: BAZNAS diolah kembali

Hal ini juga diperkuat dengan temuan Bayuni (2023), Purbasari, dkk. (2020), serta A. S. Widiastuti & Kosasih (2021) yang memperoleh bahwa KSI tidak signifikan terhadap kemiskinan dikarenakan, belum optimalnya kemampuan BAZNAS dalam menghimpun dan meyalurkan dana KSI. Tabel 4.13, menunjukkan rendahnya rasio realisasi KSI terhadap potensi KSI.

Meskipun penelitian ini menemukan bahwa KSI tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, beberapa penelitian sebelumnya (Muhammad dkk., 2023; Mutmainah dkk., 2024; Sari dkk., 2019; Sulaeman dkk., 2021; T. Widiastuti dkk., 2022) menemukan hasil sebaliknya yaitu distribusi dana KSI dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar para mustahik bahkan berepnagruh signifikan dalam mengurangi

kemiskinan. Penelitian Sari, dkk. (2019) menemukan bahwa KSI dapat membantu penerima manfaat keluar dari siklus kemiskinan (*Average Time Taken to Exit Poverty*) dengan rata-rata setengah waktu dari yang dibutuhkan (6,9 tahun menjadi 3,3 tahun).

Perbedaan hasil ini dengan sejumlah penelitian terdahulu dapat disebabkan oleh perbedaan konteks dan tingkat agregasi data yang digunakan. Penelitian terdahulu umumnya mengkaji dampak KSI pada skala mikro, dimana intervensi KSI bersifat lebih langsung sehingga pengaruhnya terhadap pengurangan kemiskinan tampak lebih kuat. Sebaliknya penelitian ini menggunakan pendekatan makro dengan data agregat tingkat provinsi, di mana nilai distribusi KSI relatif kecil dibandingkan jumlah penduduk miskin serta belanja bantuan sosial pemerintah. Selain itu, variasi efektifitas tata kelola KSI antarprovinsi turut memengaruhi besarnya dampak yang terdeteksi secara statistik. Meskipun demikian, secara teoritis KSI tetap memiliki potensi sebagai instrumen pengentasan kemiskinan apabila dikelola secara efisien dan berkelanjutan.

4.2.2.6.3. Pengaruh DKSI terhadap pendidikan

Hasil estimasi model struktural menunjukkan bahwa distribusi keuangan sosial Islam berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pendidikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa alokasi dana KSI pada sektor pendidikan belum mampu memberikan dampak positif yang berarti terhadap peningkatan capaian kualitas pendidikan pada indikator pendidikan dasar dan menengah, bahkan menunjukkan kecenderungan arah hubungan yang negatif. Berdasarkan buklet beasiswa BAZNAS RI (2025) sebagian besar penerima manfaat program

pendidikan tersebut didominasi oleh mahasiswa pada jenjang pendidikan tinggi (S1 ke atas). Pola distribusi ini cenderung memberikan dampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia jangka panjang, namun tidak secara langsung memengaruhi tingkat partisipasi pendidikan pada jenjang dasar hingga menengah. Selain itu, rendahnya proporsi distribusi dana KSI pada sektor pendidikan, hanya sekitar 9% dari total distribusi, sehingga kontribusinya relatif kecil dibandingkan sektor lainnya.

Hasil ini berbeda dengan temuan penelitian (Said dkk., 2023) yang menyatakan bahwa meskipun potensi zakat belum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indikator pembangunan berkelanjutan dan kualitas pendidikan secara umum, zakat tetap memberikan pengaruh positif terhadap akses pendidikan berkualitas melalui program beasiswa BAZNAS dan dukungan penelitian. Temuan serupa juga ditemukan oleh Muhammad & Al-Shagdari (2024) yang menunjukkan KSI berperan dalam meningkatkan pendidikan dan dapat menjadi alternatif untuk mengatasi keterbelakangan pendidikan di Nigeria Utara dengan mengurangi biaya anggaran pemerintah, berfokus pada pendanaan dari domestik sehingga dapat mengurangi pinjaman pemerintah dari investor asing. Aziz, dkk. (2025) menemukan bahwa distribusi zakat pada sektor publik mengurangi kesenjangan dalam pendidikan, rumah tangga penerima manfaat (mustahik) cenderung menghadapi hambatan yang lebih rendah dalam mengakses pendidikan. Robbana, dkk. (2024) juga menunjukkan distribusi zakat berpengaruh positif terhadap pendidikan melalui berkurangnya rasio anak yang tidak bersekolah. Secara keseluruhan, perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa dampak KSI terhadap pendidikan sangat bergantung

pada besaran alokasi dan fokus program distribusi. Ketika dana KSI dialokasikan secara terbatas dan tidak berorientasi pada penggunaan akses pendidikan jangka panjang, pengaruhnya terhadap pendidikan menjadi tidak signifikan. Sebaliknya, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa zakat dapat memberikan dampak positif apabila diarahkan secara lebih strategis pada program pendidikan yang berkelanjutan.

4.2.2.6.4. Pengaruh DKSI terhadap pengangguran

Hasil estimasi model struktural menunjukkan bahwa distribusi keuangan sosial Islam berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan distribusi dana KSI dalam jangka pendek cenderung disertai dengan peningkatan tingkat pengangguran pada tingkat makro. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Tunjung & Auwalin (2020) dan Anindya & Pimada (2023) yang menunjukkan bahwa distribusi dana KSI dalam jangka pendek dapat meningkatkan pengangguran, meskipun ada penelitian Anindya & Pimada (2023) pengaruh tersebut tidak signifikan. Kondisi ini dapat terjadi karena efek distribusi zakat yang bersifat sementara dan transisional, di mana sebagian penerima bantuan belum langsung terserap ke dalam kegiatan ekonomi produktif atau pasar tenaga kerja. Berdasarkan data penyaluran program dibidang ekonomi BAZNAS (2026), jumlah mustahik yang terdampak relatif kecil dibandingkan dengan total angkatan kerja serta belum tersebar secara merata pada seluruh provinsi di Indonesia, sehingga dampaknya terhadap pasar tenaga kerja agregat menjadi terbatas.

Namun demikian, hasil ini berbeda dengan temuan Rusydiana dkk., (2025)

yang menunjukkan bahwa distribusi zakat berpengaruh signifikan dalam mengurangi pengangguran. Studi tersebut menegaskan bahwa zakat yang dialokasikan melalui pendanaan modal usaha, pelatihan kewirausahaan, dan penciptaan lapangan kerja mampu meningkatkan pendapatan dan menyerap tenaga kerja, sehingga berdampak pada penurunan pengangguran. Perbedaan hasil ini mengindikasikan dampak distribusi KSI terhadap pengangguran sangat bergantung pada jangka waktu dan pola pemanfaatan dana KSI, di mana distribusi yang masih didominasi bantuan non-produktif dan belum terintegrasi dengan program peningkatan keterampilan kerja membatasi kemampuan KSI dalam menekan pengangguran secara langsung.

Dengan demikian, temuan ini mengindikasikan bahwa peran KSI dalam mengurangi pengangguran akan menjadi lebih efektif apabila diarahkan pada program pemberdayaan ekonomi produktif dan didukung oleh peningkatan kualitas pembangunan manusia. Integrasi distribusi zakat dengan upaya peningkatan IPM berpotensi memperkuat daya serap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran secara berkelanjutan.

4.2.2.6.5. Pengaruh DKSI terhadap kesehatan

Hasil estimasi model struktural menunjukkan bahwa distribusi keuangan sosial Islam berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kesehatan. Temuan ini mengindikasikan bahwa alokasi KSI pada sektor kesehatan belum mampu memberikan dampak yang berarti terhadap peningkatan kesehatan masyarakat secara agregat. Salah satu faktor yang menjelaskan kondisi tersebut adalah keterbatasan jangkauan layanan kesehatan berbasis zakat, di mana hingga tahun

2024 BAZNAS melalui program Rumah Sehat BAZNAS (RSB) baru memiliki 22 unit, dengan 18 yang telah beroperasi, jumlah ini relatif kecil dibandingkan dengan kebutuhan kesehatan masyarakat di seluruh Indonesia. Selain itu, pada tingkat makro, indikator kesehatan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor struktural seperti fasilitas kesehatan pemerintah, tenaga medis, dan belanja kesehatan daerah, sehingga kontribusi KSI relatif kecil dalam periode penelitian yang terbatas.

Hasil penelitian ini berbeda dengan temuan Mulia, dkk. (2022) yang menunjukkan bahwa distribusi zakat melalui Kantor Layanan RS Roemani Muhammadiyah di Kota Semarang berpengaruh positif terhadap kesehatan penerima manfaat. Dampak positif tersebut dihasilkan melalui program bantuan kesehatan yang bersifat langsung dan terfokus, seperti penyediaan alat kesehatan seperti tabung oksigen, alat pengukur tekanan darah digital dan kursi roda. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh KSI terhadap kesehatan sangat dipengaruhi oleh skala, cakupan dan fokus program distribusi, di mana intervensi pada level mikro cenderung memberikan dampak yang lebih nyata dibandingkan pendekatan agregat. Dengan demikian, peran KSI dalam meningkatkan dimensi kesehatan akan lebih optimal apabila cakupan dan integrasi program kesehatan berbasis KSI diperluas secara berkelanjutan dan berorientasi jangka panjang.

4.2.2.6.6. Pengaruh DKSI terhadap kesejahteraan sosial

Pengaruh DKSI terhadap kesejahteraan sosial tidak dapat dilanjutkan ke tahap estimasi model struktural karena belum memnuhi kriteria validitas pada model. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengukuran kesejahteraan sosial bersifat multidimensi, sehingga memerlukan indikator yang lebih relevan agar

hubungan antara DKSI dan kesejahteraan sosial dapat dianalisis secara empiris dengan lebih akurat.

4.2.2.6.7. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap IPM

Hasil estimasi model struktural menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak signifikan dan berpengaruh positif terhadap IPM. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi belum mampu secara substansial mendorong perbaikan kualitas pembangunan manusia. Arah hubungan yang positif menunjukkan adanya potensi kontribusi pertumbuhan ekonomi terhadap IPM, namun besarnya pengaruh tersebut belum cukup kuat secara statistik dalam periode penelitian. Berdasarkan data anggaran belanja pemerintah BPS (2024), selama periode 2019-2023 rata-rata alokasi belanja pemerintah pusat terhadap kesehatan dan pendidikan masing-masing hanya 4,95% dan 9,34% dari total anggaran, sehingga belum cukup optimal untuk mendorong peningkatan dimensi-dimensi pembangunan manusia secara luas. Hasil ini sejalan dengan penelitian Haj & Bustaman (2025) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi belum disertai dengan peningkatan kesejahteraan sosial yang merata. Pertumbuhan ekonomi yang didominasi oleh sektor ekstratif atau sektor dengan daya serap tenaga kerja yang terbatas cenderung tidak memberikan manfaat luas terhadap peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan, maupun standar hidup yang layak.

Namun demikian, hasil penelitian ini berbeda dengan temuan (Brotherhood dkk., 2023; Emeru, 2023; Hechmi, 2025; Röthel & Leschke, 2025; Weriemmi, 2025) yang menunjukkan bahwa di negara berkembang, pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi

dalam konteks tersebut mendorong peningkatan akses terhadap teknologi, pendidikan, dan layanan kesehatan, serta mendukung inovasi yang menghasilkan tenaga kerja yang lebih terdidik dan sehat. Perbedaan temuan ini mengindikasikan bahwa dampak pertumbuhan ekonomi terhadap IPM sangat bergantung pada struktur ekonomi, kualitas pertumbuhan, dan sejauh mana hasil pertumbuhan tersebut terdistribusi secara inklusif kepada masyarakat.

4.2.2.6.8. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan

Hasil estimasi model struktural menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Temuan ini mengindikasikan meskipun pertumbuhan ekonomi cenderung menurunkan kemiskinan, namun dampaknya belum cukup kuat secara statistik. Kondisi ini dapat dijelaskan oleh keadaan ketenagakerjaan Indonesia berdasarkan laporan BPS (2024), di mana penyerapan tenaga kerja masih di dominasi oleh sektor pertanian, perdagangan dan industri pengolahan, serta status pekerjaan buruh/karyawan yang sebagian besar berada dalam kegiatan informal. Dominasi tersebut umumnya ditandai dengan produktivitas dan upah yang relatif rendah serta minimnya perlindungan sosial, sehingga pertumbuhan output ekonomi belum sepenuhnya ditransfer menjadi peningkatan pendapatan riil rumah tangga miskin. Temuan serupa ditemukan oleh Adebayo, (2025) dan Canavire-Bacarreza, dkk. (2025) yang menegaskan bahwa lemahnya pasar tenaga kerja dan inefisiensi struktural menghambat efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi kemiskinan.

Temuan ini sejalan dengan (Balasubramanian dkk., 2023; Bisiriyu dkk., 2026; Janz dkk., 2023) yang menunjukkan bahwa pada negara berkembang,

manfaat pertumbuhan ekonomi cenderung tidak inklusif dan kurang pro-miskin. Pertumbuhan ekonomi memang dapat meningkatkan pendapatan dan konsumsi, namun tidak secara otomatis memperbaiki dimensi kesejahteraan dasar seperti pendidikan, kesehatan, sanitasi, kualitas hunian dan akses layanan publik yang sangat bergantung pada kebijakan, institusi dan waktu.

Sebaliknya, sejumlah penelitian menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan kemiskinan, namun sering kali disertai peningkatan ketimpangan pendapatan (Erumban & de Vries, 2024; Fang & Zhang, 2021; Kitole dkk., 2025; Wan dkk., 2021). Bahkan Ampsonah, dkk. (2023) menunjukkan bahwa pertumbuhan berbasis PDB per kapita dapat memburuk distribusi pendapatan, sedangkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif mampu mengurangi kemiskinan tanpa meningkatkan ketimpangan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi baru akan efektif menurunkan kemiskinan apabila didukung oleh institusi pasar tenaga kerja yang kuat, perlindungan sosial, serta akses pendidikan yang merata (Halili & Gonzalez, 2025).

4.2.2.6.9. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran

Hasil estimasi model struktural menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengangguran. Temuan ini mengindikasikan bahwa penciptaan lapangan kerja tidak mampu mengimbangi peningkatan jumlah tenaga kerja yang masuk ke pasar kerja. Selisih pertumbuhan antar penduduk bekerja dan angkatan kerja relatif lebih besar. Kondisi ini menandakan ekspansi ekonomi yang terjadi belum bersifat padat karya dan belum mampu menyerap tambahan angkatan kerja secara optimal.

Hasil penelitian sejalan dengan Suparman & Muzakir (2023) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berkolerasi positif dengan tingkat pengangguran terbuka. Kondisi tersebut menunjukkan adanya fenomena *jobless growth*, dimana pertumbuhan ekonomi belum mampu menghasilkan peluang kerja yang cukup luas. Temuan serupa juga diperoleh oleh Malik & Khan (2025) di Ghana, yang menemukan hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran namun tidak signifikan. Lemahnya hubungan ini dikaitkan dengan kebijakan formalisasi sektor informal yang tidak diimbangi penguatan jaring pengaman sosial, padahal sektor informal berperan penting sebagai penyerap tenaga kerja.

Namun demikian, hasil penelitian ini berbeda dengan temuan (Abid dkk., 2023; Mohamed dkk., 2024; Ngubane dkk., 2024) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan pengangguran, terutama dalam jangka panjang. Di Somalia, pertumbuhan ekonomi mendorong penciptaan lapangan kerja, khususnya di sektor pertanian dan telekomunikasi. Sementara itu, di Aljazair dan Afrika Selatan, meskipun pertumbuhan ekonomi berkontribusi terhadap penurunan pengangguran, dampaknya relatif terbatas akibat dominasi sektor publik, inelastisitas pasar tenaga kerja, serta preferensi penggunaan modal dibandingkan tenaga kerja. Perbedaan temuan ini menegaskan bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran sangat bergantung pada struktur ekonomi, fleksibilitas pasar tenaga kerja, serta kesesuaian keterampilan tenaga kerja dengan sektor-sektor penggerak pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi akan lebih efektif menurunkan pengangguran apabila didukung oleh tenaga kerja yang memiliki

keterampilan sesuai kebutuhan sektor dan kebijakan ketenagakerjaan yang mampu mendorong penyerapan tenaga kerja, termasuk di sektor informal.

4.2.2.6.10. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pendidikan

Hasil estimasi model struktural menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pendidikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi belum efektif meningkatkan akses dan partisipasi pendidikan pada tingkat dasar dan menengah secara merata. Laporan penyaluran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) menunjukkan bahwa selama periode 2020-2023, BOS reguler menyerap lebih dari 61% realisasi belanja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini menunjukkan bahwa akses pendidikan dasar dan menengah lebih banyak ditentukan oleh kebijakan anggaran pemerintah pusat sehingga dinamika pertumbuhan ekonomi belum secara langsung tercermin dalam perubahan APM pada tingkat nasional. Akan tetapi, faktor sosial ekonomi rumah tangga tetap memiliki peran dalam menentukan keberlangsungan partisipasi sekolah, khususnya pada kelompok rentan dan miskin.

Temuan Wan dkk., (2021) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif dapat menurunkan kemampuan rumah tangga miskin untuk berinvestasi dalam pendidikan anak, yang berimplikasi pada rendahnya APM. Hasil ini sejalan dengan dengan penelitian Emeru, (2023), Jones, dkk. (2023), serta H. Li & Liu, (2021) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di negara berkembang cenderung bersifat selektif dan bias terhadap tenaga kerja berpendidikan menengah dan tinggi. Imbal hasil pendidikan (*return to education*)

yang lebih tinggi pada jenjang pendidikan lanjut menyebabkan pendidikan dasar dan menengah menjadi kurang responsif terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, penelitian Chan, dkk. (2025) menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi lebih berdampak pada pendidikan tinggi dan aktivitas inovatif, seperti investasi R&D dan paten, dibandingkan pada pendidikan dasar dan menengah. Feldmann (2025) juga menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi melalui belanja pemerintah di sektor pendidikan memiliki peran yang relatif terbatas dalam meningkatkan capaian pendidikan siswa.

Namun demikian, hasil penelitian ini berbeda dengan temuan Röthel & Leschke (2025) dan Gharsallah & Trabelsi (2025) serta Bloom, dkk. (2021) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendidikan dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi meningkatkan kapasitas fiskal negara untuk berinvestasi pada infrastruktur pendidikan, kualitas guru, dan teknologi pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan partisipasi dan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Perbedaan temuan ini menunjukkan bahwa dampak pertumbuhan ekonomi terhadap pendidikan sangat bergantung pada kualitas pertumbuhan, kebijakan alokasi anggaran, serta fokus investasi pendidikan, khususnya pada jenjang dasar dan menengah yang menjadi indikator utama dalam penelitian ini.

4.2.2.6.11. Pengaruh pertumbuhan terhadap kesehatan

Hasil estimasi model struktural menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesehatan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi berkontribusi pada

perbaikan layanan kesehatan dasar, yang salah satunya tercermin dari rasio puskesmas per kecamatan yang secara nasional hampir memenuhi standar minimum sebagaimana diatur Permenkes RI Nomor 19 Tahun 2024. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Al Humssi, dkk. 2025 dan Weibo & Yimer (2019) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berdampak positif terhadap kesehatan melalui peningkatan kapasitas fiskal dan belanja kesehatan pemerintah per kapita. Al Humssi, dkk. (2025) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi meningkatkan penyediaan layanan kesehatan, meskipun kekuatan dampaknya berbeda antar tingkat pembangunan, pada negara berkembang dampaknya relatif belum cukup kuat secara absolut untuk menyelesaikan seluruh permasalahan kesehatan. Weibo & Yimer (2019) juga menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berkontribusi pada peningkatan harapan hidup serta penurunan angka kematian bayi, balita dan kematian kasar.

Temuan ini diperkuat oleh penelitian Hussien, dkk. (2025) di Arab Saudi, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi meningkatkan akses layanan kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat, meskipun di sisi lain turut memicu tantangan kesehatan baru seperti peningkatan obesitas akibat perubahan gaya hidup. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat memperluas layanan kesehatan, tetapi juga membawa implikasi kesehatan yang bersifat struktural.

Namun demikian, hasil penelitian ini berbeda dengan temuan Nasreen, dkk. (2024) yang menunjukkan bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesehatan tidak signifikan dan bersifat tidak simetris, bergantung pada tahap

pembangunan. Pada tahap awal pembangunan, peningkatan pendapatan belum cukup mendorong peningkatan pengeluaran kesehatan, sementara pada tahap pembangunan yang lebih tinggi, pertumbuhan ekonomi justru memperkuat permintaan dan kapasitas pembiayaan layanan kesehatan. Perbedaan temuan ini mengindikasikan bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesehatan tidak bersifat langsung dan seragam, melainkan sangat dipengaruhi oleh konteks pembangunan dan efektivitas sumber daya kesehatan.

4.2.2.6.12. Pengaruh pertumbuhan terhadap KS

Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan sosial tidak dapat dilanjutkan ke tahap estimasi model struktural karena belum memenuhi kriteria validitas pada model. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengukuran kesejahteraan sosial bersifat multidimensi, sehingga memerlukan indikator yang lebih relevan agar hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial dapat dianalisis secara empiris dengan lebih akurat.

4.2.2.6.13. Pengaruh DKSI terhadap kemiskinan melalui IPM

Hasil estimasi model struktural menunjukkan bahwa DKSI berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan melalui IPM. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Zahro & Mashudi., 2025) dimana ditemukan zakat berpengaruh signifikan dalam mengurangi kemiskinan di Kabupaten Bangkalan melalui sektor IPM yaitu pendidikan dan kesehatan sebagai mediasi. Distribusi zakat yang tepat sasaran berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan membuka peluang bagi penerima manfaat. Hal ini juga menunjukkan bahwa zakat yang diberikan tidak hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif jangka pendek tetapi

juga investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas hidup. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sahara, dkk. (2025) dimana pengaruh zakat terhadap kemiskinan tidak bersifat langsung. Zakat lebih efektif menurunkan kemiskinan apabila disalurkan melalui program-program yang berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan standar hidup masyarakat.

Hasil ini berbeda dengan penelitian Rusanti, dkk. (2023) yang menganalisis dampak distribusi zakat terhadap IPM melalui lima sektor prioritas. Ditemukan hasil distribusi zakat tidak berpengaruh terhadap dimensi ekonomi pada IPM dikarenakan realisasi dana zakat hanya mencapai 6,84% dan sebagian besar didistribusikan dalam bentuk konsumtif sehingga tidak memberikan manfaat jangka panjang sehingga belum mampu mengeluarkan dari kemiskinan. Perbedaan hasil ini dipengaruhi oleh pendekatan metodologis yang digunakan Rusanti, dkk. (2023) menggunakan regresi *Ordinary Least Square (OLS)* untuk menguji hubungan antarvariabel, sementara penelitian ini menggunakan pendekatan struktural yang menekankan peran variabel mediasi. Perbedaan metode ini berimplikasi pada kemampuan model dalam menangkap mekanisme tidak langsung antara zakat, pembangunan manusia, dan kemiskinan. Dengan demikian, perbedaan hasil antara penelitian ini tidak bersifat kontradiktif, melainkan mencerminkan perbedaan fokus dimensi IPM, efektivitas dan pola distribusi zakat, serta pendekatan analisis yang digunakan. Temuan Rusanti, dkk. (2023) justru menguatkan hasil penelitian ini bahwa zakat akan lebih berdampak apabila diarahkan secara strategis pada sektor-sektor yang secara langsung meningkatkan kualitas pembangunan manusia, khususnya pendidikan dan kemanusiaan, sebagai

prasyarat penurunan kemiskinan.

4.2.2.6.14. Pengaruh DKSI terhadap pendidikan melalui IPM

Hasil estimasi model struktural menunjukkan bahwa distribusi KSI berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendidikan melalui IPM. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan distribusi KSI mampu memperbaiki kualitas pembangunan manusia yang kemudian akan mendorong meningkatnya akses dan partisipasi pendidikan. Hasil ini sejalan dengan Robbana, dkk. (2024) yang menemukan bahwa zakat berpengaruh positif terhadap pendidikan melalui IPM, khususnya melalui peningkatan rasio pendaftaran pendidikan dasar dan menengah.

Namun selanjutnya, hasil penelitian ini berbeda dengan temuan Siswantoro & Ikhwan (2024) yang menunjukkan bahwa distribusi KSI tidak signifikan terhadap dimensi pendidikan IPM, yang diukur melalui Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Meskipun KSI berkontribusi terhadap peningkatan IPM secara agregat, dampaknya belum merata pada setiap dimensi, termasuk pendidikan. Perbedaan ini dapat dijelaskan oleh relatif kecilnya proporsi distribusi KSI yang dialokasikan ke sektor pendidikan, yakni hanya sekitar 9% dari total distribusi pada lima sektor utama, serta lemahnya ketepatan sasaran dan keberlanjutan program pendidikan berbasis KSI. Kondisi tersebut menyebabkan dampak KSI terhadap pendidikan lebih melalui peningkatan kualitas pembangunan secara umum dibandingkan pengaruh langsung pada capaian pendidikan di setiap jenjang.

4.2.2.6.15. Pengaruh PE terhadap kemiskinan melalui IPM

Hasil estimasi model struktural menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi

berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan melalui peningkatan kualitas pembangunan manusia, pengaruh tersebut belum cukup kuat secara statistik dalam periode penelitian. Arah hubungan negatif menunjukkan bahwa peningkatan tersebut diikuti dengan perbaikan IPM yang kemudian berkontribusi pada penurunan kemiskinan. Namun, tidak signifikannya pengaruh tersebut mengindikasikan bahwa manfaat pertumbuhan tersebut belum terdistribusi secara merata dan belum sepenuhnya diinterpretasikan ke dalam peningkatan dimensi IPM antara lain, akses pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak bagi kelompok miskin. Hasil ini sejalan dengan penelitian Adebayo (2025) yang menemukan ketidakberhasilan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas pendidikan dalam mengurangi kemiskinan yang diakibatkan kegagalan pasar tenaga kerja dalam menyerap tenaga kerja terlatih di Nigeria. Temuan ini memperkuat hasil penelitian, khususnya pada dimensi pendidikan, belum tentu berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan apabila terjadinya ketidaksesuaian struktur pasar tenaga kerja dalam menyediakan kesempatan tenaga kerja.

Dengan demikian, peran IPM sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan belum berjalan secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu disertai dengan kebijakan yang mendorong relasi antara peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penciptaan lapangan kerja agar tercapainya penurunan kemiskinan secara signifikan dan berkelanjutan.

4.2.2.6.16. Pengaruh PE terhadap pendidikan melalui IPM

Hasil estimasi model struktural menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pendidikan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Temuan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum mampu meningkatkan capaian pendidikan secara tidak langsung melalui perbaikan kualitas pembangunan manusia. Hasil ini sejalan dengan penelitian Jones, dkk. (2023) dan Rubio-Ortiz, dkk. (2025) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi mempengaruhi IPM secara tidak langsung melalui peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup, khususnya konsumsi. Namun, manfaat tersebut cenderung terkonsentrasi pada kelompok dengan tingkat pendidikan atau imbal hasil ekonomi yang lebih tinggi, sehingga dampaknya terhadap peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah terbatas.

Temuan ini juga didukung oleh de Pleijt & Frankema (2025) yang menunjukkan bahwa di negara berkembang, pertumbuhan ekonomi lebih efektif meningkatkan pembangunan manusia apabila difokuskan pada penyelesaian pendidikan tinggi, bukan sekedar perluasan pendidikan dasar dan menengah. Dalam konteks Indonesia, capaian pendidikan masih didominasi oleh perluasan pendidikan dasar dan menengah, sementara APM SMA belum mencapai 100% dan APK perguruan tinggi masih dibawah 50%. Kondisi ini menunjukkan bahwa jalur transmisi pertumbuhan ekonomi melalui IPM belum cukup kuat untuk mendorong pendidikan secara menyeluruh. Selain itu, Brotherhood, dkk. (2023), Han & Lee (2020), J. Li, dkk. (2024), dan Xu, dkk. (2020) menegaskan bahwa dampak pertumbuhan ekonomi terhadap pendidikan akan optimal apabila terdapat

keterkaitan antara pendidikan dasar dan pendidikan tinggi dalam proses akumulasi modal manusia. Ketidaksinambungan antar jenjang pendidikan dapat melemahkan efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan pendidikan.

Adebayo (2025) dan Chekol (2024) juga menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak diiringi dengan pertumbuhan modal dan penciptaan lapangan kerja berisiko menghasilkan surplus tenaga kerja berpendidikan tinggi. Berdasarkan laporan berita resmi statistik (2025) mengenai tingkat pengangguran terbuka Indonesia tingkat pendidikan penduduk bekerja Indonesia masih didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan SD ke bawah dengan jumlah 34,75% atau 50,92 juta orang, yang mengindikasikan bahwa struktur pasar tenaga kerja di Indonesia belum mampu menyerap lulusan pendidikan tinggi secara optimal. Kondisi ini semakin memperlemah peran IPM dalam memediasi pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pendidikan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa distribusi KSI berperan lebih langsung dan signifikan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat Indonesia terutama pada peningkatan pembangunan manusia, meskipun besarnya tidak sama pada setiap dimensi. Hal ini menegaskan bahwa instrumen keuangan sosial Islam berfungsi sebagai mekanisme redistribusi yang mampu menjangkau kelompok rentan yang tidak sepenuhnya tersentuh oleh mekanisme pertumbuhan ekonomi.
2. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan hubungan yang cenderung positif namun belum signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya bertransformasi menjadi perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, maupun penurunan kemiskinan dan pengangguran secara merata, sehingga mencerminkan pola pertumbuhan yang masih sektoral, padat modal, dan kurang peka terhadap penciptaan lapangan kerja serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
3. Dampak distribusi KSI dan pertumbuhan ekonomi terhadap dimensi IPM bersifat heterogen. Pada sektor pendidikan dan kesehatan, pengaruh keduanya sangat dipengaruhi oleh besar anggaran, cakupan program, serta dominasi kebijakan pemerintah pusat. Sementara itu, pada dimensi ketenagakerjaan dan kemiskinan, peningkatan keduanya belum secara

konsisten menurunkan pengangguran dan kemiskinan, yang mengindikasikan masih adanya persoalan struktural di pasar tenaga kerja dan keterbatasan intervensi sosial.

4. Pertumbuhan ekonomi belum cukup tanpa mekanisme redistribusi yang efektif. Temuan penelitian menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat Indonesia yang lebih merata membutuhkan sinergi antara pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan distribusi KSI yang terarah, berkelanjutan, serta terintegrasi, di mana KSI berperan sebagai instrumen pelengkap penting dalam memperkuat keadilan sosial dan inklusivitas pembangunan manusia.

5.2. Saran dan Keterbatasan

1. Penguatan alokasi distribusi KSI terutama pada dimensi pembangunan manusia yang berdampak langsung, khususnya dalam menjaga keberlanjutan akses pendidikan kelompok rentan. Pemerintah bersama BAZNAS RI disarankan mengoptimalkan distribusi KSI melalui intervensi preventif terhadap putus sekolah, seperti bantuan biaya pendidikan, dukungan perlengkapan sekolah, serta penyelarasan dengan kebijakan bantuan pendidikan nasional. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat dampak jangka panjang KSI terhadap kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.
2. Penyaluran distribusi KSI perlu lebih diarahkan pada program yang bersifat produktif dan berkelanjutan, seperti pendidikan berjenjang, layanan kesehatan bersinambungan, dan pemberdayaan ekonomi agar dampaknya

tidak hanya pada jangka pendek tetapi juga pada jangka panjang sehingga tercermin secara agregat pada indikator kesejahteraan masyarakat.

3. Distribusi KSI perlu diselaraskan dengan kebijakan pembangunan nasional terutama dibidang pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan agar berfungsi sebagai instrumen pelengkap belanja publik. Hal ini memungkinkan distribusi KSI dalam melengkapi kebijakan yang belum terjangkau pemerintah, sehingga dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.
4. Penelitian ini menggunakan data yang bersifat agregat provinsi sehingga belum sepenuhnya mencerminkan variasi kualitas, kesinambungan dan tepatan sasaran program KSI. Kondisi ini membatasi kemampuan penelitian dalam menangkap dampak distribusi KSI secara lebih mendalam, terutama pada tingkat individu atau rumah tangga penerima manfaat.
5. Periode waktu penelitian yang relatif terbatas, di mana dampak distribusi KSI cenderung bersifat jangka panjang terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan, sehingga pengaruh terhadap beberapa sektor kesejahteraan masyarakat Indonesia belum sepenuhnya terlihat dalam indikator yang digunakan.
6. Perbedaan kapasitas kelembagaan dan kelengkapan pelaporan distribusi KSI antarprovinsi berpotensi memengaruhi ketepatan pengukuran intensitas distribusi KSI.
7. Pendekatan *PLS-SEM* yang bersifat prediktif dan berorientasi pada pengembangan teori, hasil estimasi difokuskan pada kekuatan dan arah

hubungan struktural antar konstruk laten serta peran variabel mediasi pada model. Oleh karena itu, temuan penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai hubungan struktural dan peran mediasi antar konstruk dalam kerangka *PLS-SEM*, yang relevan untuk memahami dinamika kesejahteraan masyarakat Indonesia, meskipun tidak dimaksudkan untuk menarik kesimpulan kausal secara langsung. Hal ini juga memungkinkan masih adanya faktor eksternal di luar model yang turut memengaruhi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abid, M., Benmeriem, M., Gheraia, Z., Sekrafi, H., Abdelli, H., & Meddah, A. (2023). Asymmetric effects of economy on unemployment in Algeria: Evidence from a nonlinear ARDL approach. *Cogent Economics & Finance*, 11. <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2192454>
- Adebayo, T. (2025). Funding the future: Nigeria's battle against poverty through government expenditure. *Journal of Government and Economics*, 17.
- Al Humssi, A. S., Popkova, E. G., Sergi, B. S., Sorokina, L. N., & Akhmetshina, L. G. (2025). The impact of GDP and CO 2 emissions on domestic general government health expenditure per capita. Evidence from 166 countries. *Unconventional Resources*, 8.
- Ampsonah, M., Agbola, F. W., & Mahmood, A. (2023). The relationship between poverty, income inequality and inclusive growth in Sub-Saharan Africa. *Economic Modeling*, 126.
- Anindya, A. S., & Pimada, L. M. (2023). An Indonesia Experience: Does Zakat Enhance Macroeconomic Variables? *International Journal of Zakat*, 8(1), 25–42.
- Asya'bani, N., Afifa, U. N., Widiastuti, T., Mawardi, I., & Soleh, M. (2025). Analysis of the impact of zakat fund distribution on mustahik productivity in Indonesia. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship (RISFE)*, 4(2), 177–195.
- Aziz, Y., Mansor, F., Waqar, S., & Zada, N. (2025). Zakat and Sustainable Development Goals (SDGs). Assessing the Ripple Effect of Obligatory-Alms Spending on Education. Empirical Evidence From Pakistan. *Asian Social Work and Policy Review*, 19(1).
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2024*.
- Balasubramanian, P., Burchi, F., & Malerba, D. (2023). Does economic growth reduce multidimensional poverty? Evidence from low- and middle-income countries. *World Development*, 161(106119). <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.106119>
- Barclay, D. W., Higgins, C. A., & Thompson, R. (1995). The partial least squares approach to causal modeling: Personal computer adoption and use as illustration. *Technology Studies*, 2, 285–309.

- Bayuni, E. M. (2023). The Effect of GDP, Zakat, and Infaq Shadaqah On-Demand for Money and Their Relationship to Income and Poverty in Indonesia. *4th International Conference on Islamic Economics, Business, Philanthropy, and PhD Colloquium (ICIEBP 2022)*, 73–86.
- BAZNAS. (2025). *Booklet Beasiswa BAZNAS RI*. Tim Pendidikan dan Dakwah BAZNAS RI. <https://heyzine.com/flip-book/17ae9f2812.html#page/1>
- BAZNAS. (2026). *Ekonomi Pedesaan*. <https://baznas.go.id/program/ekonomi-pedesaan>
- Bisiriyu, S. O., Devaguptapu, A., & Malik, M. H. (2026). Effect of Globalization on Poverty Reduction: Global Threshold Evidence for Achieving Sustainable Development Goal 1. *Research in Globalization*, 12.
- Bloom, D. E., Khoury, A., Kufenko, V., & Prettnner, K. (2021). Spurring Economic Growth through Human Development: Research Results and Guidance for Policymakers. *Population And Development Review*, 47(2), 377–409.
- BPS. (2024). *Tabel Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Fungsi*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA4MiMy/tabel-anggaran-belanja-pemerintah-pusat-berdasarkan-fungsi.html>
- Brotherhood, L., Delalibera, B. R., & Pereira, L. T. de M. (2023). Public overspending in higher education. *Bulletin of Economic Research*, 75, 588–608.
- Canavire-Bacarreza, G., Puerta-Cuartas, A., & Beverinotti, J. (2025). Efficiency in poverty reduction in Bolivia. *Journal of Policy Modeling*, 47, 569–587.
- Chan, J., Sun, Y., & Zhang, L. (2025). First-class universities, economic development, and the middle-income trap. *International Studies of Economics*, 20, 69–90.
- Chekol, F. (2024). Reviewing the macroeconomic relevance of education system in Ethiopia: the role of skill gap. *Cogent Education*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/2331186X.2024.2365584>
- Cohen, J. (1992). A power primer. *Psychological Bulletin*, 112, 155–159.
- de Pleijt, A. M., & Frankema, E. (2025). The deeper roots of human capital formation and economic development in Southeast Asia, 1900–2000. *Journal*

of Development Economics.

- Emeru, G. M. (2023). Effect of Public Expenditure on Economic Growth in the Case of Ethiopia. *The Scientific World Journal*.
- Erumban, A. A., & de Vries, G. J. (2024). Structural change and poverty reduction in developing economies. *World Development*, 181.
- Fang, Y. ., & Zhang, F. (2021). The Future Path To China's Poverty Reduction—Dynamic Decomposition Analysis With The Evolution Of China's Poverty Reduction Policies. *Social Indicators Research*, 158(2), 507–538.
- Feldmann, H. (2025). Economic freedom and the quality of education. *Kyklos*, 78, 86–110.
- Gharsallah, M., & Trabelsi, S. (2025). The Impact of Education Quality on Economic Growth: A Panel Cointegration and Causality Analysis. *Bulletin of Economic Research*, 1–11.
- Hair, Joseph, F., Risher, Jeffrey, J., Sarstedt, M., & Ringle, Christian, M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. *European Business Review*, 31(1), 2–24.
- Hair, J. F., G, T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2017). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* (2 ed.). Sage.
- Haj, J., & Bustamam, N. (2025). The Effect of Government Expenditure And Economic Growth on The Human Development Index in Riau Province. *INVEST: Jurnal Inovasi Bisnis dan Akuntansi*, 6(2), 284–294.
- Halili, B. L., & Gonzalez, C. R. (2025). The contingent effects of economic growth and institutions on income inequality: An empirical study. *The Journal Of International Trade & Economic Development*, 1–32. <https://doi.org/10.1080/09638199.2025.245171>
- Hamad, A. U. (2023). Zakat as an Effective Strategy for Poverty Alleviation in Zanzibar. *International Journal of Zakat*, 8(1), 95–109.
- Hamid, A., & Jamaluddin. (2023). Promoting SDGs: The Role of Zakat in Improving Human Development Index. *IHTIYATH: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 7(2), 152–159.
- Han, J.-S., & Lee, J.-H. (2020). Demographic change, human capital, and economic growth in Korea and Japan. *Japan and the World Economy*, 3, 1–13.

- Hasbi, M. Z. N. (2023). The Relevance of The Human Development Index from an Islamic Perspective to Macroeconomics and Zakat: A Measure of The Development of The World's Muslim Community. *Muslim Business and Economics Review*, 2(2), 251–268.
- Hechmi, S. (2025). Economic, Social, and Environmental Drivers of Human Development in Vietnam: An ARDL Approach. *Economies*, 13(319). <https://doi.org/10.3390/economies13110319>
- Hulland, J. (1999). Use of Partial Least Squares (PLS) in Strategic Management Research: A Review of Four Recent Studies. *Strategic Management Journal*, 20(2), 195–204.
- Hussien, H. H., Hagabdulla, N. H., Ahmed, K. M. Y., Albadwi, F. I. A., & Alotaibi, K. N. (2025). The impact of economic growth on public health and well-being: An empirical analysis of Saudi Arabia. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 11.
- Janz, T., Augsburg, B., Gassmann, F., & Nimeh, Z. (2023). Leaving no one behind: Urban poverty traps in Sub-Saharan Africa. *World Development*, 172.
- Jones, S., Sohnesen, T. P., & Trifkovic, N. (2023). Educational expansion and shifting private returns to education: Evidence from Mozambique. *Journal of International Development*, 35, 1407–1428.
- Kitole, F. A., Msoma, L. J., & Sesabo, J. K. (2025). Navigating the economic landscape: a comprehensive analysis of government spending, economic growth, and poverty reduction nexus in Tanzania. *Applied Economics Letters*, 32(9), 1306–1310.
- Li, H., & Liu, S. (2021). Higher Education, Technological Innovation, and Regional Sustainable Development: Insights from a VAR Model. *Discrete Dynamics in Nature and Society*.
- Li, J., Xue, E., Wei, Y., & He, Y. (2024). How popularising higher education affects economic growth and poverty alleviation: empirical evidence from 38 countries. *Humanities & Social Sciences Communications*, 11(520).
- Malik, A. A., & Khan, A. U. I. (2025). COVID-19 and the Okun's law: the case of Ghana. *Cogent Economics & Finance*, 13(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2025.2460074>
- Mohamed, A. A., Abdulle, A. Y., & Omar, M. M. (2024). The role of

macroeconomic factors in shaping employment trends in Somalia. *COGENT ECONOMICS & FINANCE*, 12(1).
<https://doi.org/10.1080/23322039.2024.2416989>

Muhammad, T., & Al-Shagdari, F. (2024). Islamic social finance system: an alternative tool for tackling educational setbacks in Northern Nigeria. *Islamic social finance system*, 15(11), 3115–3136. <https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2023-0149>

Muhammad, T., Al-Shagdari, F., & Ibrahim, S. M. (2023). Islamic Social Finance in Addressing Poverty and Economic Growth: Using Structural Equation Modelling. *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, 20(2), 179–191.

Mulia, M. N., Salsabila, F. I., Rahmawati, A. N., Ayuningtyas, R., & Dwi. (2022). Management of Zakat Funds in the Mustahik Medical Device Assistance Program. *Indonesian Conference of Zakat - Proceedings*, 310–318.

Mutmainah, S., Rahayu, N. W. I., Fauzan, & Sholichin, A. A. (2024). The influence of zakat, Human Development Index, open unemployment rate, and income on poverty in Indonesia . *Journal of Islamic Economics Lariba* , 10(1), 364–382.

Nasreen, S., Tiwari, A. K., Nisa, M. ., & Ishtiaq, F. (2024). Evaluating the Role of GDP Per Capita, Air Pollution and Non-Economic Factors in Determining Health Expenditure: Evidence from Asian Region Using Instrumental Variables Techniques. *Economic Papers, The Economic Society of Australia*, 43(1), 69–30.

Ngubane, M. Z., Mndebele, S., & Ilesanmi, K. D. (2024). Is the current economic performance compatible with the projected NDP unemployment target? *Cogent Economic Finance*, 12(1).
<https://doi.org/10.1080/23322039.2024.2350699>

Purbasari, L. T., Sukmana, R., & Ratnasari, R. T. (2020). Efektivitas Zakat, Infaq dan Shodaqoh dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia: Menggunakan Teknik Basic Needs Deficiency Index. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(2), 222–223.
<https://doi.org/https://doi.org/10.20473/vol7iss20202pp222-233>

Robbana, A., Raghobi, A., & Fahm, A. O. (2024). Revisiting Socioeconomic Development Hypothesis: Does Zakat Matter for OIC Member Countries? *Journal of the Knowledge Economy*, 15, 14379–14404.
<https://doi.org/10.1007/s13132-023-01632-y>

- Röthel, T., & Leschke, M. (2025). Unveiling the mutual dynamics: Institutions, education and economic growth over 138 years in OECD countries. *Kyklos*, 78, 243–270.
- Rubio-Ortiz, R., Patiño, D., & Gómez-García, F. (2025). Does Public Expenditure on Education Improve Well-Being? International Evidence. *Kyklos*, 78, 1225–1241.
- Rusanti, E., Anindya, A. S., Atiya, N., & Widiastuti, T. (2023). Does Zakat Impact on Human Development Index? Empirical Evidence from Indonesia. *International Journal of Zakat*, 8(2), 36–47.
- Rusydiana, A. S., Prakoso, M. F. D., Aslan, H., & Riani, R. (2025). Unveiling the effects of zakat toward socioeconomic empowerment in OIC countries. *International Journal of Ethics and Systems*. <https://doi.org/10.1108/IJOES-10-2024-0331>
- Sahara, D. F., Mukhsin, M., & Pardiansyah, E. (2025). Pengaruh Kinerja Zakat, Gini Rasio Dan Angkatan Kerja Terhadap Kemiskinan Dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(5), 3388–3414.
- Said, M., Darmawati, Hadiningdyah, D. I., & Hadromi, Y. (2023). Effect of Zakat Potential Management on Achieving SDGs: Case of the Indonesian National Amil Zakat Agency. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 9(1), 160–188.
- Sari, D. F., Beik, I. S., & Rindayati, W. (2019). Investigating the Impact of Zakat on Poverty Alleviation: A Case from West Sumatra, Indonesia. *International Journal of Zakat*, 4(2), 1–12.
- Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan P. M. (2023). *Laporan Penyaluran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan*. Kemendikdasmen. https://bosp.kemendikdasmen.go.id/rekap/penyaluran?tahun=2022&tahap=1&jenis_bos=reguler
- Siswanto, S., & Ikhwan, I. (2024). Does Islamic social finance promote the quality of human resources? *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship (RISFE)*, 3(1), 20–35.
- Statistik, B. P. (2025). *Berita Resmi Statistik*. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/11/05/2479/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-85-persen--rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-33-juta-rupiah-.html>

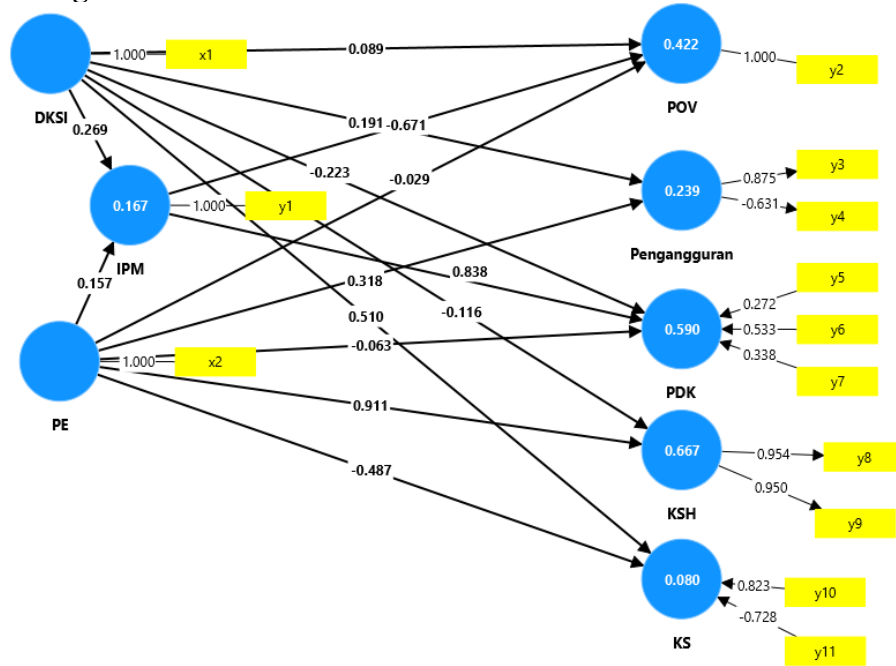
- Sulaeman, Majid, R., & Widiastuti, T. (2021). The Impact of Zakat on Socio-Economic Welfare before COVID-19 Pandemic in Indonesia: A Quantitative Study. *International Journal of Zakat*, 6(2), 75–90.
- Suparman, S., & Muzakir, M. (2023). Regional inequality, human capital, unemployment, and economic growth in Indonesia: Panel regression approach. *Cogent Economic & Finance*, 11. <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2251803>
- Tawakkal, M. R., Rahim, R., & Alfarisi, M. F. (2023). ZIS (Zakat, Infaq, and Sadaqah) and Economic Growth In Socio-Economic Dimension (Evidence : West Sumatera). *History: Educational Journal of History and Humanities*, 6(3), 952–965. <https://doi.org/10.24815/jr.v631.33672>
- Tunjung, Z. P., & Auwalin, I. (2020). Pengaruh Zakat Infak Sedekah (ZIS) Terhadap Pengangguran Di Indonesia: Metode Autoregressive Distributed Lag (Ardl). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(2), 372–388. <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/vol7iss20202pp372-388>
- Wan, G., Wang, C., & Zhang, X. (2021). The Poverty-Growth-Inequality Triangle: Asia 1960s to 2010s. *Social Indicators Research*, 153(3), 795–822.
- Weibo, X., & Yimer, B. (2019). The Effect of Healthcare Expenditure on the Health Outcomes in Sub-Saharan African Countries. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 12(4), 1–22.
- Weriemmi, M. E. (2025). Does innovation contribute to the three pillars of sustainable development? A comparative study between developed and developing countries. *Environmental Economics and Policy Studies*, 27, 741–779.
- Widiastuti, A. S., & Kosasih. (2021). The Effect Of Zis, Economic Growth, Unemployment And Inflation On Poverty Levels In Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 4(1), 80–90.
- Widiastuti, T., Mawardi, I., Zulaikha, S., Herianingrum, S., Robani, A., Al Mustofa, M. U., & Atiya, N. (2022). The nexus between Islamic social finance, quality of human resource, governance, and poverty. *Heliyon*, 8(12).
- Xu, H., Hsu, W., Meen, T.-H., & Zhu, J. H. (2020). Can Higher Education, Economic Growth and Innovation Ability Improve Each Other? *Sustainability*, 12(6).

Zahro, F., & Mashudi. (2025). The Influence Of Zakat On Education And Health As A Mediating Variable For Poverty Alleviation In Bangkalan Society. *Jurnal Al-Ijtimaayah*, 11(1), 47–60.

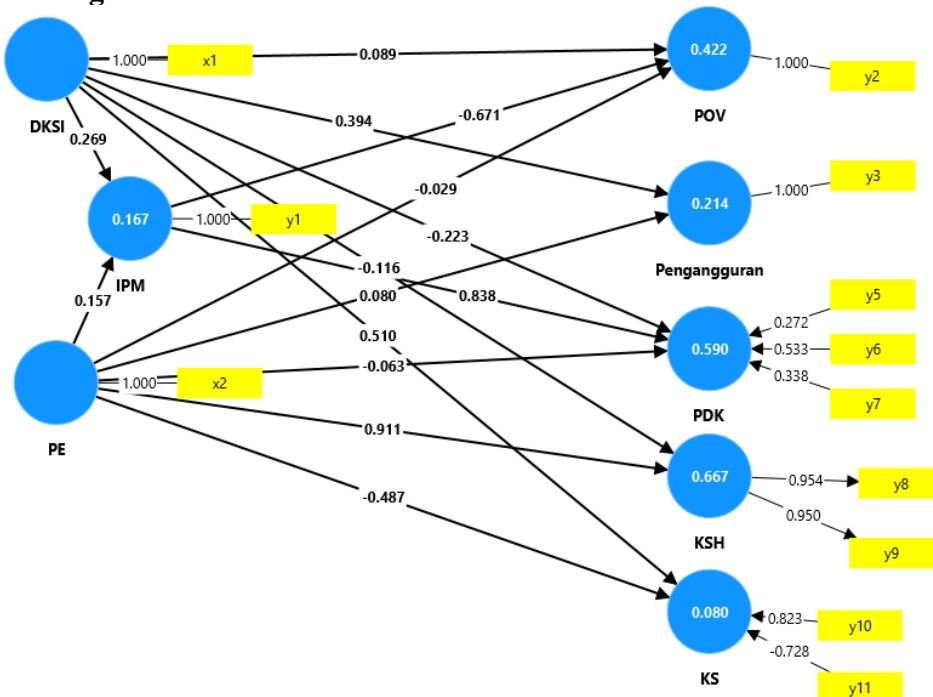
LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 OUTPUT HASIL *SmartPLS*

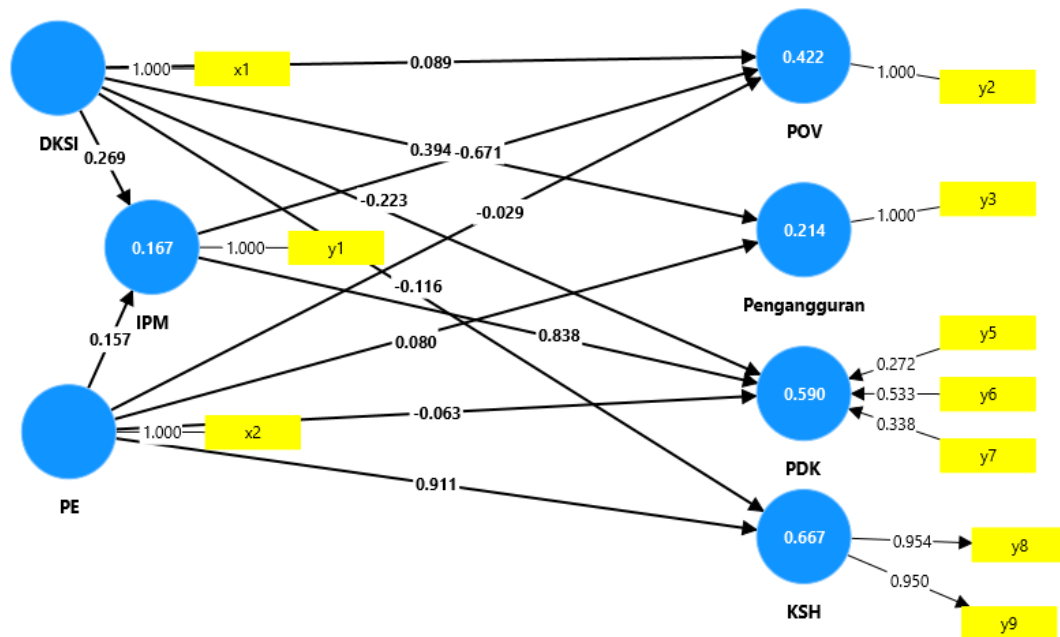
1. Diagram Jalur Estimasi Pertama



2. Diagram Jalur Estimasi kedua



3. Diagram Jalur Akhir



4. Hasil Uji Multikolinearitas

Indikator	VIF	Indikator	VIF
DKSI	1,000	APMSD	3,454
PDRB	1,000	APMSMP	2,180
IPM	1,000	APMSMA	2,120
POV	1,000	PKS	2,938
TPT	1.000	Klinik	3,454

LAMPIRAN 2 Data Variabel estimasi

1. Data Indikator Variabel KSI, PE, IPM, UNE 2019-2023

Provinsi	x1	x2	y1	y2	y3	y4
	DKSI	PDRB	IPM	POV	TPT	TSP
	(Miliar Rp)	(Miliar Rp)	(Indeks)	(%)	(%)	(%)
ACEH	223,41	132.070	71,9	15,3	5,5	12,38
ACEH	259,19	131.580	72	15	5,4	16,18
ACEH	272,9	135.270	72,2	15,3	6,3	13,16

ACEH	201,38	140.97 0	72,8	14,6	6	10,4 6
ACEH	285,41	146.93 0	73,4	14,5	5,8	10,4 9
SUMUT	28,21	539.51 0	71,7	8,8	5,6	7,68
SUMUT	49,85	533.75 0	71,8	8,8	4,7	10,4 3
SUMUT	78,04	547.65 0	72	9	6	9,67
SUMUT	47,61	573.53 0	72,7	8,4	5,5	6,83
SUMUT	69,35	602.24 0	73,4	8,2	5,2	6,73
SUMBAR	126,27	172.21 0	72,4	6,4	5,4	9,2
SUMBAR	132,81	169.43 0	72,4	6,3	5,3	12,9 3
SUMBAR	158,43	175.00 0	72,7	6,6	6,7	10,2 8
SUMBAR	144,24	182.63 0	73,3	5,9	6,2	8,68
SUMBAR	160,26	191.07 0	73,8	6	5,9	9,81
RIAU	83,34	495.61 0	73	7,1	5,4	8,29
RIAU	156,29	490.00 0	72,7	6,8	4,9	11,8 7
RIAU	114,06	506.47 0	72,9	7,1	5	9,95
RIAU	124,91	529.53 0	73,5	6,8	4,4	7,42
RIAU	187,06	551.83 0	74	6,7	4,3	8,03
JAMBI	36,01	149.11 0	71,3	7,6	3,5	8,57
JAMBI	43,56	148.35 0	71,3	7,6	4,3	11,2 5
JAMBI	72,99	153.85 0	71,6	8,1	4,8	9,75
JAMBI	43,08	161.73 0	72,1	7,6	4,7	7,46
JAMBI	56,85	169.28 0	72,8	7,6	4,5	9,26

SUMSEL	30,09	315.46 0	70	12,7	4	9,22
SUMSEL	37,1	315.13 0	70	12,7	3,9	12,9 8
SUMSEL	50,93	326.41 0	70,2	12,8	5,2	10,9 3
SUMSEL	39,66	343.50 0	70,9	11,9	4,7	7,08
SUMSEL	44,51	360.97 0	71,6	11,8	4,5	8,46
BENGGKULU	12,13	46.350	71,2	15,2	2,4	10,1 2
BENGGKULU	16,18	46.340	71,4	15	3,1	13,0 9
BENGGKULU	18,05	47.850	71,6	15,2	3,7	11,1 6
BENGGKULU	11,14	49.920	72,2	14,6	3,4	8,02
BENGGKULU	20,05	52.050	72,8	14	3,2	9,31
LAMPUNG	10,55	244.38 0	69,6	12,6	4	8,66
LAMPUNG	15,37	240.32 0	69,7	12,3	4,3	13,1 8
LAMPUNG	22,64	246.97 0	69,9	12,6	4,5	10,3 3
LAMPUNG	22,06	257.53 0	70,5	11,6	4,3	6,92
LAMPUNG	28,29	269.24 0	71,2	11,1	4,2	8,51
KEP, B. BELITUNG	29,81	53.940	71,3	4,6	3,3	6,25
KEP, B. BELITUNG	20,87	52.710	71,5	4,5	3,4	9,11
KEP, B. BELITUNG	21,68	55.370	71,7	4,9	5	6,05
KEP, B. BELITUNG	25,33	57.800	72,2	4,5	4,2	3,37
KEP, B. BELITUNG	32,79	60.340	72,9	4,5	3,9	5,35
KEP, RIAU	39,33	181.88 0	75,5	5,9	7	2,84
KEP, RIAU	53,2	174.96 0	75,6	5,9	6	5,75
KEP, RIAU	53,45	180.95 0	75,8	6,1	10,1	6,17
KEP, RIAU	40,82	190.11 0	76,5	6,2	8	4,95
KEP, RIAU	39,78	199.91 0	77,1	5,7	7,6	4,8

DKI JAKARTA	1418,47	1.836.240	80,8	3,5	5,5	1,89
DKI JAKARTA	1758,84	1.792.290	80,8	4,5	5,2	6,43
DKI JAKARTA	2241,08	1.856.000	81,1	4,7	8,5	6,76
DKI JAKARTA	1562,5	1.953.490	81,7	4,7	8	2,71
DKI JAKARTA	1227,36	2.050.470	82,5	4,4	7,6	2,96
JAWA BARAT	1362,7	1.490.960	72	6,9	7,8	5,52
JAWA BARAT	1368,42	1.453.380	72,1	7,9	7,7	10,31
JAWA BARAT	1402,84	1.507.750	72,5	8,4	8,9	8,8
JAWA BARAT	1112,66	1.589.980	73,1	8,1	8,4	5,62
JAWA BARAT	1104,38	1.669.420	73,7	7,6	7,9	6,32
JATENG	216,1	991.520	71,7	10,8	4,2	5,36
JATENG	265,97	965.230	71,9	11,4	4,2	8,6
JATENG	311,67	997.320	72,2	11,8	6	7,23
JATENG	369,4	1.050.280	72,8	10,9	5,8	5,39
JATENG	401,24	1.102.470	73,4	10,8	5,2	6,4
DIY	30,27	104.490	80	11,7	2,9	3,94
DIY	51,18	101.700	80	12,3	3,4	8,04
DIY	65,46	107.370	80,2	12,8	4,3	6,37
DIY	59,5	112.900	80,6	11,3	3,7	4,76
DIY	64,13	118.630	81,1	11	3,6	5,62
JAWA TIMUR	470,67	1.649.900	71,5	10,4	3,8	5,23
JAWA TIMUR	466,06	1.611.390	71,7	11,1	3,6	8,99

JAWA TIMUR	510,54	1.668.750	72,1	11,4	5,2	7,47
JAWA TIMUR	387,96	1.757.870	72,8	10,4	4,8	5,77
JAWA TIMUR	419,18	1.844.810	73,4	10,4	4,3	5,74
BANTEN	180,04	456.620	72,4	5,1	7,6	4,52
BANTEN	218,48	441.150	72,5	5,9	8	9,53
BANTEN	237,24	460.950	72,7	6,7	9	7,84
BANTEN	123,02	484.130	73,3	6,2	8,5	4,57
BANTEN	138,05	507.430	73,9	6,2	8	5,11
BALI	5,63	162.690	75,4	3,8	1,2	1,93
BALI	5,65	147.500	75,5	3,8	1,3	8,62
BALI	8,75	143.870	75,7	4,5	5,4	8,53
BALI	10,51	150.830	76,4	4,6	4,8	3,93
BALI	13,21	159.450	77,1	4,3	3,7	2,57
NTB	99,21	93.870	68,1	14,6	3,2	13,97
NTB	121,82	93.290	68,3	14	3	16,83
NTB	135,02	95.440	68,7	14,1	4	15
NTB	97,14	102.070	69,5	13,7	3,9	13,3
NTB	127,9	103.910	70,2	13,9	3,7	12,83
KALBAR	8,58	137.240	67,7	7,5	4,1	7,93
KALBAR	25,57	134.740	67,7	7,2	4,5	10,42
KALBAR	24,61	141.210	67,9	7,2	5,7	9,62
KALBAR	8,89	148.370	68,6	6,7	4,9	7,21
KALBAR	12,76	154.980	69,4	6,7	4,5	6,78

KALTENG	2,9	100.35 0	70,9	5	3,2	6,05
KALTENG	3,03	98.930	71,1	4,8	3,3	8,04
KALTENG	4,43	102.48 0	71,3	5,2	4,3	6,01
KALTENG	4,15	109.09 0	71,6	5,3	4,2	5,38
KALTENG	5,3	113.61 0	72,2	5,1	3,8	6,11
KALSEL	29,71	133.28 0	70,7	4,6	3,4	6,67
KALSEL	39,86	130.86 0	70,9	4,4	3,7	9,38
KALSEL	48,03	135.42 0	71,3	4,8	4,3	8,28
KALSEL	35,58	142.34 0	71,8	4,5	4,2	6,76
KALSEL	68,57	149.23 0	72,5	4,3	4	6,48
KALTIM	62,58	486.52 0	76,6	5,9	6,7	4,74
KALTIM	53,32	472.39 0	76,2	6,1	6,7	7,14
KALTIM	62,82	484.44 0	76,9	6,5	6,8	5,97
KALTIM	43,12	506.16 0	77,4	6,3	6,8	4,81
KALTIM	63,68	537.63 0	78,2	6,1	6,4	3,45
SULAWESI UTARA	14,64	89.010	73	7,7	5,2	6,38
SULAWESI UTARA	11,52	88.130	72,9	7,6	5,3	11,0 5
SULAWESI UTARA	13,75	91.790	73,3	7,8	7,3	8,8
SULAWESI UTARA	11,57	96.770	73,8	7,3	6,5	6,27
SULAWESI UTARA	8,94	102.07 0	74,4	7,4	6,2	6,05
SULAWESI TENGAH	5,22	127.94 0	69,5	13,5	3,5	9,1
SULAWESI TENGAH	6,91	134.15 0	69,6	12,9	2,9	10,5 3
SULAWESI TENGAH	9,21	149.82 0	69,8	13	3,7	10,3 8
SULAWESI TENGAH	8,47	172.62 0	70,3	12,3	3,7	7,62

SULAWESI TENGAH	9,57	193.18 0	71	12,4	3,5	7,68
SULAWESI SELATAN	170,9	330.51 0	71,7	8,7	5,1	7,34
SULAWESI SELATAN	241,41	328.15 0	71,9	8,7	5,7	9,96
SULAWESI SELATAN	283,77	343.40 0	72,2	8,8	5,8	7,42
SULAWESI SELATAN	104,47	360.91 0	72,8	8,6	5,8	6,23
SULAWESI SELATAN	112,22	377.21 0	73,5	8,7	5,3	7,09
SULAWESI TENGGARA	15	94.050	71,2	11,2	2,9	8,46
SULAWESI TENGGARA	16,95	93.450	71,5	11	3,1	10,4 9
SULAWESI TENGGARA	35,79	97.280	71,7	11,7	4,2	10,4 5
SULAWESI TENGGARA	13,87	102.66 0	72,2	11,2	3,9	8,14
SULAWESI TENGGARA	44,88	108.15 0	72,8	11,4	3,7	10,3 2
GORONTALO	24,68	28.429	68,5	15,5	3,3	6,16
GORONTALO	34,17	28.430	68,7	15,2	3,3	7,68
GORONTALO	36,02	29.110	69	15,6	3,4	6,08
GORONTALO	22,1	30.280	69,8	15,4	3,3	6,1
GORONTALO	28,43	31.640	70,5	15,2	3,1	8,32
MALUKU UTARA	0,22	26.600	68,7	6,8	5	8,15
MALUKU UTARA	0,8	28.030	68,5	6,8	4,1	10,7 8
MALUKU UTARA	2,14	32.740	68,8	6,9	5,1	9,76
MALUKU UTARA	1,01	40.250	69,5	6,2	5	9,28
MALUKU UTARA	2,33	48.490	70,2	6,5	4,6	7,32
PAPUA BARAT	1,56	62.070	64,7	22,2	5,8	8,9
PAPUA BARAT	1,68	61.600	65,1	21,4	6,8	13,1 8
PAPUA BARAT	1,88	61.290	65,3	21,8	6,2	12,0 6
PAPUA BARAT	1,56	62.530	65,9	21,3	5,8	12,2 9
PAPUA BARAT	0,46	40.970	66,7	20,5	5,5	7,81
PAPUA	6,67	134.57 0	60,8	27,5	3,2	7,03

PAPUA	6,88	137.79 0	60,4	26,6	3,4	11,2 6
PAPUA	9,62	158.68 0	60,6	26,9	3,8	8,72
PAPUA	10,47	172.91 0	61,4	26,6	3,6	5,85
PAPUA	6,5	49.550	62,3	26	3,5	4,39

2. Data Indikator Variabel PDK, KSH, KS 2019-2023

Provinsi	y5	y6	y7	y8	y8	y10	y11
	APM SD	APMS MP	APMS MA	PK S	Klin ik	PBIJ KN	KPM BSP
	(%)	(%)	(%)	(Un it)	(Uni t)	(%)	(%)
ACEH	99,1	86,5	70,4	359	114	84,4	2,26
ACEH	99	86,9	70,7	359	121	80,9	2,82
ACEH	99	87	70,8	360	222	87,1	2,20
ACEH	99,1	88,2	71,2	362	285	86,8	20,80
ACEH	99	84,9	71,7	365	392	81,4	18,48
SUMUT	97,7	80,3	67,5	601	874	42,9	2,90
SUMUT	97,7	80,6	68	608	874	39,3	3,42
SUMUT	97,7	81,1	68	615	892	42,9	3,14
SUMUT	98	81,8	68,3	615	982	48,2	17,87
SUMUT	98	82,1	68,7	619	982	42,6	17,21
SUMBAR	98,7	78,1	68,5	275	212	48,1	3,54
SUMBAR	98,8	78,4	68,9	276	240	45,4	4,47
SUMBAR	98,8	78,8	69	279	244	50	3,97
SUMBAR	98,8	78,9	68,4	280	248	49,6	28,83
SUMBAR	98,9	80,2	69,2	280	280	47,4	26,54
RIAU	97,3	79,9	63,6	228	176	33,5	2,33
RIAU	97,7	80,5	64	231	178	35,7	3,11
RIAU	97,9	80,5	64	234	281	38,9	2,69
RIAU	97,8	80,4	63,9	238	284	45,6	18,30
RIAU	98,1	80,8	64,8	239	480	50,7	17,21
JAMBI	99,1	79,5	60,9	205	148	35,7	2,69
JAMBI	99,1	79,9	61,4	207	153	34,4	3,42
JAMBI	99,4	79,9	61,6	207	167	37,7	2,67
JAMBI	99,3	79,9	60,7	207	175	42,6	16,61
JAMBI	99,3	80,2	60,6	208	191	36,7	15,48
SUMSEL	97,9	77,6	59,9	341	255	50,4	2,13

SUMSEL	97,9	78	60,5	343	332	47,9	2,54
SUMSEL	98	78,3	60,5	345	411	54,4	2,09
SUMSEL	98,1	78,7	61	348	452	60,8	14,33
SUMSEL	98,1	79,1	61,2	350	540	58,6	13,04
BENKULU	98,7	78,8	65,5	178	65	45,7	1,86
BENKULU	98,7	79,8	65,8	179	65	43,2	2,20
BENKULU	98,6	80,3	66,1	179	66	48,9	1,98
BENKULU	98,6	80,3	66,6	179	87	60,9	14,24
BENKULU	98,6	81,1	67,1	179	118	55,1	13,27
LAMPUNG	99,2	80,4	59,4	310	284	54,9	2,82
LAMPUNG	99,2	81,2	59,6	312	289	48,6	3,35
LAMPUNG	99,1	82	60,3	315	421	52,7	2,88
LAMPUNG	99,3	82,1	62	318	434	59,7	20,54
LAMPUNG	99,2	80,6	62,8	320	503	50,7	19,62
KEP, B. BELITUNG	97,7	74,1	58,4	64	73	35	3,05
KEP, B. BELITUNG	97,7	74,6	58,8	64	73	34,6	4,59
KEP, B. BELITUNG	97,9	74,6	58,8	64	80	42,9	3,34
KEP, B. BELITUNG	98	74,7	59,7	64	80	51,1	15,05
KEP, B. BELITUNG	98,1	77	60,7	64	94	50,6	15,48
KEP, RIAU	99,1	85,5	73	86	229	24,7	1,95
KEP, RIAU	99,2	86,5	73,5	88	247	26,3	2,41
KEP, RIAU	99,3	86,6	73,4	93	281	29,3	2,04
KEP, RIAU	99,2	86,8	73,5	93	311	32,8	13,59
KEP, RIAU	99,3	86,8	74,1	95	314	32,1	11,63
DKI JAKARTA	98,1	81,7	60,2	315	858	61,3	2,64
DKI JAKARTA	98,1	82,5	60,4	315	898	56	2,35
DKI JAKARTA	98,2	83	60,5	315	1068	59,3	2,05
DKI JAKARTA	98,4	84,2	60,9	315	1541	60,3	14,11
DKI JAKARTA	98,4	85	60,8	315	1889	55,1	11,77
JAWA BARAT	98,3	81,3	57,5	1072	3010	42,5	3,44
JAWA BARAT	98,4	82,1	57,9	1083	3449	42,7	4,19

JAWA BARAT	98,4	82,9	58,6	108 6	348 6	45,6	4,20
JAWA BARAT	98,3	82,8	58,6	110 0	387 5	50,2	28,37
JAWA BARAT	98,2	83,6	59	110 0	395 1	45	25,32
JATENG	97,8	79,8	59,4	879	941	55,5	3,00
JATENG	97,9	80,5	59,7	879	114 0	49,9	3,93
JATENG	98,2	81	60,5	880	151 7	52,3	3,32
JATENG	98,4	81	61,2	880	166 0	54,6	24,85
JATENG	98,5	81,6	61,5	881	193 5	48,7	20,35
DIY	99,5	84	70,5	121	215	52,1	2,80
DIY	99,6	84	71	121	248	52,9	3,38
DIY	99,4	83,6	71,4	121	331	54,5	2,75
DIY	99,4	85,3	74,5	121	348	58	21,39
DIY	99,4	85,6	76,4	121	354	54,5	18,72
JAWA TIMUR	98	82,8	61,8	968	895	46,8	2,83
JAWA TIMUR	98	83,5	62,2	968	907	46,5	3,42
JAWA TIMUR	97,9	83,8	62,6	971	111 1	51,3	2,70
JAWA TIMUR	98,1	83,8	62,1	971	168 0	55,8	21,65
JAWA TIMUR	98	83,9	62,6	972	207 3	49,9	17,41
BANTEN	98	81,9	58,8	243	762	42,3	4,05
BANTEN	98	82,7	59,1	245	762	35,3	3,53
BANTEN	98,2	84,3	59,7	246	834	43,7	3,08
BANTEN	97,9	84,7	59,5	247	985	47,4	19,26
BANTEN	98	85,4	60,4	253	100 3	41,4	16,96
BALI	96,8	86,8	73	120	176	54,7	4,04
BALI	96,8	87,3	73,3	120	181	50,1	4,68
BALI	97,2	87,1	74,8	120	233	53,8	3,64
BALI	97,5	86,9	74,7	120	279	53,4	26,54
BALI	97,8	84,8	75,6	120	285	46,8	18,86
NTB	98,9	83,9	66	169	124	66,2	2,73
NTB	98,8	85	66,8	174	126	60,7	3,54
NTB	98,8	85,3	67,1	175	131	64,4	2,58

NTB	98,8	86,1	67,6	176	195	68,7	16,96
NTB	98,8	84	68	176	227	61,6	15,30
KALBAR	97,1	66,7	51,2	246	99	65,6	3,04
KALBAR	97,4	67,4	51,7	246	102	64,1	4,53
KALBAR	97,4	68,1	51,8	247	104	69,3	3,85
KALBAR	97,5	68,3	51,9	248	127	78,2	28,21
KALBAR	97,7	70,9	54,8	249	202	72,2	24,60
KALTENG	99,1	77,7	53,8	203	156	42,6	2,60
KALTENG	99,1	78,5	54,1	203	176	37,6	3,97
KALTENG	99	78,8	54,3	204	177	40,2	2,92
KALTENG	99,1	78,8	55,7	204	178	43,5	17,68
KALTENG	99,1	79,1	55,6	204	207	42,6	15,21
KALSEL	98,8	74,8	57,8	233	50	50,2	3,52
KALSEL	98,8	75,5	58,3	234	66	44,3	4,63
KALSEL	98,9	75,9	58,4	235	71	48,8	3,72
KALSEL	99,1	76,3	59,6	236	165	50,5	24,72
KALSEL	99,1	77,4	59,8	236	234	40,8	24,55
KALTIM	98,4	80,4	68,6	187	274	40,4	11,04
KALTIM	98,4	81,3	69	187	277	42,8	13,69
KALTIM	98,4	81,3	69,3	188	280	48,5	10,53
KALTIM	98,5	82,7	69,1	188	285	48,9	69,09
KALTIM	98,5	83,4	69,9	188	376	45,7	54,15
SULAWESI UTARA	95	74,3	64,7	195	26	31,6	3,92
SULAWESI UTARA	95,1	74,8	65	195	26	28,9	4,73
SULAWESI UTARA	95,4	74,9	65,4	198	34	39,4	3,50
SULAWESI UTARA	95,4	76,1	65,7	199	56	43,2	23,79
SULAWESI UTARA	95,7	76,6	66,2	199	66	40,5	20,08
SULAWESI TENGAH	93,2	73,8	60,1	206	66	67,1	2,32
SULAWESI TENGAH	93,2	74,4	60,3	207	69	55,8	2,92
SULAWESI TENGAH	93,3	75	60,4	215	72	61,8	2,42
SULAWESI TENGAH	93,3	75,6	60,4	218	93	58,7	18,44
SULAWESI TENGAH	93,3	76,8	60,6	218	122	48,4	16,64

SULAWESI SELATAN	98,1	75,8	57,5	459	285	61,6	2,92
SULAWESI SELATAN	98	76,2	57,9	461	287	53,5	4,08
SULAWESI SELATAN	98,3	77	58,2	469	287	66,1	3,58
SULAWESI SELATAN	98,4	77,4	58,5	472	301	69,5	26,91
SULAWESI SELATAN	98,4	78	60,2	474	405	60,1	23,48
SULAWESI TENGGARA	97,5	77	62,9	290	62	67,3	5,30
SULAWESI TENGGARA	97,7	77,6	63,4	292	63	59,1	6,75
SULAWESI TENGGARA	98,2	77,9	63,7	293	65	66,1	5,60
SULAWESI TENGGARA	98,3	77,8	64,1	302	68	68,4	41,14
SULAWESI TENGGARA	98,5	76,5	64	307	93	69	36,80
GORONTALO	98,4	70,3	57,5	93	9	67,3	1,40
GORONTALO	98,5	70,7	57,9	93	15	59,1	1,96
GORONTALO	98,7	71,2	58,2	93	38	66,1	1,56
GORONTALO	98,7	71,7	58,5	94	45	68,4	12,34
GORONTALO	98,7	73,6	60,2	95	62	69,5	10,68
MALUKU UTARA	97,1	76,2	64	147	33	50,8	3,26
MALUKU UTARA	97,2	76,9	64,3	147	35	40,2	3,68
MALUKU UTARA	97,2	77	64,1	147	36	49,4	3,18
MALUKU UTARA	97,3	77,4	65,4	148	38	54,2	23,51
MALUKU UTARA	97,4	78,5	65,8	150	53	48,4	21,82
PAPUA BARAT	93,8	69,9	63,2	159	32	46,9	1,48
PAPUA BARAT	93,9	70,5	63,6	161	33	47,2	2,31
PAPUA BARAT	94,1	70,5	63,5	162	33	46,9	1,58
PAPUA BARAT	94,3	71,4	63,7	163	36	46	6,93
PAPUA BARAT	94,5	74,7	65,9	76	25	47,6	4,47
PAPUA	79,2	57,2	44,3	420	37	30,3	0,02
PAPUA	79,3	58	44,7	420	41	32,5	0,06
PAPUA	80,4	57,9	44,4	428	42	32,6	0,06

PAPUA	81,7	59,1	47,6	428	55	29,2	6,55
PAPUA	80,7	60,2	48,3	123	49	27,9	1,38